

## BAB II

### Subjek, Representasi dan Politik Feminisme di dalam Perspektif Modernisme

Menjadi perempuan dengan pengalaman yang khusus ternyata tidak cukup ketika perempuan itu sendiri telah kehilangan aspek perbedaan. Melihat feminisme seharusnya dimulai dengan transparansi yaitu ketika subjek berdiri tanpa pretensi. Namun politik transparansi menyudahi diskursus sebenarnya feminisme yang berkisar antara pembicaraan subjek, politik representasi dan eksklusi. Subjek feminisme adalah perempuan yang memiliki citra subversif yang ditandai secara negatif maupun inferior di dalam tatanan dominan. Selama ini subjek feminisme dianggap stabil dan berada sebelum norma. Subjek yang diletakkan sebelum norma berarti tidak dapat dipertanyakan karena statusnya alamiah. Subjek yang stabil menandakan adanya kesatuan substantif dari berbagai penceritaan identitas yang fragmentif. Stabilitas tersebut menandakan kondisi biologisnya ajeg dan deterministik.

Perempuan dikatakan subjek melalui asumsi tubuh sebagai medium pasif untuk menanamkan nilai. Namun, apakah menjadi perempuan berarti harus berhubungan dengan fakta alamiah atau diinterpretasi secara kultural. Atau kealamiahannya itu terkonstitusi diskursus yang memproduksi tubuh di dalam kategori perbedaan seksual. Pertanyaan inilah yang terus mewarnai asumsi subjek di dalam feminisme. Di dalam kerangka binerian gender, perempuan dan laki-laki dikatakan memiliki stabilitas yang inheren, baik persepsi masing-masing selalu berangkat dari faktor biologis. Menstabilkan satu subjek berarti mereferensikan yang lain sebagai kondisi inferior. Hal ini menjadi keniscayaan subjek sebagai sebuah relasi dengan yang lain. Dan oposisi biner menjadi perangkat strategis untuk menandakan diri terpisah dari 'yang lain', memiliki jarak, dan menjadi oposisi, sehingga dapat memandang yang lain secara objektif dan mereifikasi oposisi sebagai keniscayaan.

Di sinilah perempuan menjadi sebuah posisi yang berlawanan dengan laki-laki serta diposisikan secara inferior sebagai 'yang lain'. Memosisikan yang lain secara inferior menunjukkan bahwa terdapat posisi subjek yang menaruh dirinya sebagai Tuan dan yang lain sebagai budak. Tentu saja pemosisian ini merupakan bentuk etika *promethean* yang menjunjung diri sebagai pengendali alam.

Begitulah subjektivitas, dia berangkat dari hubungan antara diri dan yang lain. Hubungan tersebut tidak terlepas dari relasi kuasa dimana diri memiliki otoritas dan otonomi untuk menandakan yang lain sebagai *the other*. Karena itu hubungan keduanya menjadi problem penandaan yang diwadahi oleh bahasa sebagai sistem yang menunjukkan intellegibilitas subjek. Problem feminisme masih akan menyangkut tentang hubungan diri dan yang lain dimana di dalamnya terdapat sistem pertukaran. Pertukaran ini bersifat timpang dan cenderung mengabaikan perempuan sebagai subjek. Karena itu dengan mengusung nilai persamaan perempuan berusaha menunjukkan subjektivitasnya, berusaha memenuhi standar kemanusiaan yang utuh, berusaha menjadi subjek yang dibangun berdasar stabilitas.

Stabilitas subjek berarti memosisikan subjek sebelum norma atau hukum, berada pada ruang pre-diskursif sebagai bentuk temporal, mengkonstruksi kealamiahan. Feminisme radikal berkuat pada pembicaraan seksualitas perempuan yang selalu disalahartikan sehingga memberi privilege bagi nilai maskulin di masyarakat. Karena itu feminis radikal berusaha untuk mengafirmasi femininitas untuk dapat mentransformasi sosial. Namun, asumsi tentang femininitas masih dipertanyakan apakah nilai tersebut hadir secara alamiah atau dikonstruksi oleh normalisasi dan regulasi. Subjek dibentuk secara non-historis yang memberi jaminan bagi penjelasan ontologi di dalam ruang pra-sosial.

Kerangka subjek yang stabil diciptakan di dalam landasan yang fondasional sehingga memunculkan problem politik. Feminisme radikal misalnya lebih mendahulukan identitas keperempuanan dibanding misi politiknya, *identity must be in first place before political action*. Yang terpenting bukan saja mengusung persamaan hak namun juga memutuskan apakah perempuan berjuang dengan atau tanpa identitas. Dengan afirmasi terhadap femininitas maka

perempuan menciptakan suatu *common identity*. Feminisme dalam hal ini mulai mengkonsolidasi adanya politik representasi dimana subjek mencari legitimasi politiknya.

Politik representasi ini ditunjukkan dengan perempuan mencoba berdiri sebagai subjek yang mewakili perempuan lain. Subjek diasumsikan koheren, singular dan stabil dan dilawankan melalui kerangka biner maskulin-feminin. Pada akhirnya politik representasi yang mengartikulasikan subjek yang stabil menyingkirkan perempuan yang lain. Kesatuan identitas ini menciptakan fragmentasi di dalam kategori perempuan. Subjek diasumsikan terkonstitusi di dalam proses diskursus sehingga menjadi bentuk yang dikonstruksi. Subjek tidak dapat lagi dianggap sebagai yang berdiri sebelum hukum tetapi juga merupakan efek politik yang terdiri dari kontestasi norma dan hukum. Ketika feminisme menganggap konstituennya menyatu maka pada saat itu terjadi faksionalisasi atau perpecahan.

Feminisme kontemporer tidak lagi melandaskan posisi yang fondasional bagi subjek tetapi menciptakan separatisme atau pemisahan. Dari konstelasi sejarah terbukti bahwa politik representasi di dalam feminisme yang coba meng'umum'kan perempuan terus menerus terbentur permasalahan perbedaan ras, kelas dan etnis. Jika memang feminisme bergerak sebagai politik representasi dimana tujuan politiknya adalah membebaskan perempuan dari penindasan atau menghapus kuasa dominan patriarki maka subjek perempuan tidak dapat lagi dilandaskan sebagai kondisi yang stabil. Feminisme walalupun mengadopsi kerangka konseptual modern yang menggunakan nilai universal dan fondasional tetap harus memperhatikan kontingenitas perbedaan yang dimiliki berbagai perempuan. Sebagai subjek feminisme, perempuan berdiri bukan secara esensial tetapi menjadi posisi politik dimana definisi perempuan tersebut bergantung pada relasi yang terkonstruksi dimana ia dideterminasi.

Pertanyaannya, ketika subjek dianggap tidak lagi stabil, terfragmentasi, bagaimanakah politik representasi perempuan? apakah dihapuskan atau terbuka kemungkinan untuk menandakan kembali politik normatif feminisme? Politik representasi selama ini menghapus multiplisitas perempuan sehingga menjadi

tujuan strategis bagi politik feminisme. Feminisme telah mengambil resiko dengan berusaha mewakili perempuan sebagai *all women*. Ketika menciptakan identitas umum perempuan maka feminisme telah menyingkirkan *the other* sebagai tidak konkret. Keumuman ini adalah sebuah irisan epistemik dimana identitas seseorang berusaha disamakan di dalam suatu komunitas sehingga sebisa mungkin menanggalkan atribut latar belakang yang berbeda. Namun, kondisi *Otherness* itu tidak dihilangkan hanya saja dibayangkan secara imajiner, berusaha diabstraksikan saja, tetapi tidak menjadi pembicaraan utama di dalam politik.

‘Yang lain’ ini diposisikan di dalam kondisi yang tidak dilihat secara konkret dimana setiap subjek dibentuk oleh kesejarahannya. Hal ini dapat dilihat dalam konsep modern dimana ketika subjek berkomunikasi maka yang diutamakan adalah subjek yang rasional dan setara. Di dalam politik representasi feminisme dikarakterisasi oleh *common identity*. Subjek dianggap setara untuk dapat melanggengkan perjuangan politik, menciptakan keputusan yang rasional dan menciptakan pemahaman satu sama lain. Argumentasi dibuat berdasarkan dimungkinkannya kondisi yang setara (*equal*), satu sama lain berpartisipasi di dalam kerjasama untuk mencari kebenaran dimana setiap orang tidak memaksakan (*koersif*) yang lain untuk menghasilkan argumen.

Kebenaran yang diciptakan secara normatif ini harus mampu menciptakan validitas di dalam klaim kebenaran. Di dalam prinsip kontraktualisme ini feminisme ingin menciptakan kondisi politik yang sama sebagai usaha untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan. Liberalisme berorientasi pada keadilan dimana perempuan dapat merasakan kesempatan yang sama dan hak yang setara akan pendidikan, ekonomi dan sosial.

Politik representasi menciptakan domain eksklusif yang muncul dari kontestasi. Kontestasi ini menyangkut siapa yang berbicara dan siapa yang dibisukan. Feminisme Barat dapat berbicara tidak lain karena memiliki agensi politik dan privilege dari otoritas kuasa. Namun posisi berbicara mensyaratkan adanya posisi yang diam atau bisu. Karena itu politik representasi pada dasarnya gagal karena memunculkan kelompok yang terbisukan. Feminisme liberal melalui aliansi politik global yang mencoba membantu perempuan dunia ketiga untuk

bebas dari ketertindasan justru menjadikan perempuan dunia ketiga konsep objektivikasi. Hal ini menjadi problem politik representasi dominan Barat terhadap Non-Barat.

Kita perlu menanyakan kemudian politik representasi yang dibuat feminisme untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan adalah representasi siapa? Apakah selama ini representasi tersebut mengakomodir seluruh kepentingan perempuan yang berbeda. Apakah konseptualisasi perempuan yang universal dapat memahami kondisi kesejarahan subjek yang partikular? Eksklusi bukanlah tujuan feminisme tetapi efek dari politik representasi yang terlalu dominan. Selama ini kita lupa bahwa relasi antara Diri dan Yang Lain memiliki implikasi politik dan dikonstruksi oleh kuasa. Karena itu subjek feminisme tidak mungkin terlepas dari asumsi politik.

Politik representasi mengandaikan adanya kesatuan perempuan melalui solidaritas identitas. Kesatuan subjek ini harus mengalami kontestasi dari asumsi perbedaan gender. Permasalahannya apakah gender dibangun berdasar interpretasi kultural karena sistem untuk memproduksi seksualitas perempuan telah diajarkan. Bagaimana mekanisme eksklusi itu sendiri dan dapatkah gender dikonstruksi secara berbeda? subjek yang tadinya diasumsikan *before the law* menjadi bergeser sebagai konsekuensi politik dimana norma tentang subjek dikontestasi. Hal ini muncul dari anggapan bahwa subjek dikonstruksi melalui struktur yuridis dimana praktek pengekangan, pengendalian, regulasi dan normalisasi bekerja secara produktif bukan koersif. Karena itu subjek tidak dapat dilandaskan secara ajeg karena landasan konstruksinya tidak stabil atau dapat digoyahkan. Dalam kondisi ketidakstabilan subjek ini feminisme tidak dapat lagi mempertanyakan identitas primer. Yang dapat dipertanyakan adalah kemungkinan politik apa yang menjadi konsekuensi adanya kritik terhadap kategori identitas? Politik baru seperti apa yang dibuat ketika identitas tidak lagi dikekang oleh diskursus. Bagaimana melokasikan *common identity* sebagai landasan politik feminisme di dalam regulasi dan konstruksi politis dari identitas?

Mempertanyakan subjek feminisme berarti membuang politik representasional sedangkan menjejaki operasi politik subjek harus dibarengi

dengan investigasi genealogis atas kategori perempuan. Karena itu politik feminisme yang baru dicari untuk menyelesaikan kontestasi. Jika feminisme modern dikarakterisasi oleh universalisme sehingga menciptakan eksklusi terhadap perempuan yang lain maka politik feminisme yang baru harusnya menjadi universalisme yang plural (Butler: 4)

Di dalam konseptualisasi feminisme yang fondasional karena adanya universalisme dilakukanlah negosiasi dengan tatanan dominan atau kekuasaan. Feminisme yang mengalami kritik dan melihat perbedaan secara menyeluruh muncul sebagai tuntutan untuk mendestabilisasi konsep feminisme hegemonik. Kekuasaan memunculkan subjek, *power produce subject come to present* karena itu untuk menjadi subjek yang sebenarnya dari feminisme, perempuan harus mendahului representasi itu sendiri. Karena selama ini subjek dibentuk oleh representasi, maka subjek adalah efek politik dari representasi. Hal ini menjadi problem bagi perempuan sebagai bentukan dari diskursus yang memproduksi subjek maskulin dan juga dibentuk oleh representasi subjek perempuan sebagai *all women*. Politik representasi menjadi upaya untuk menciptakan subjek yang visibel dan intellegibel melalui fungsi normatif bahasa untuk melegitimasi subjek politik. Ketika feminisme menciptakan bentuk diskursus yang memproduksi subjek bergender maka politik pembebasan perempuan menjadi martir bagi dirinya sendiri (*self-defeating*).

Feminisme yang mengatasnamakan 'kita' sebagai perempuan yang memiliki ketertindasan yang seragam harus dipikirkan kembali. Apakah hal tersebut menjadi pretensi untuk menguntungkan sebagian kelompok atau menciptakan akses politik bagi subjek yang diberi otoritas oleh kuasa. 'Kekitaan' menjadi konstruksi yang fantasmatis dimana pada dasarnya praktek tersebut mengeklusi konstituennya, seolah-olah memiliki tujuan tetapi justru mengabaikan kompleksitas internalnya. Usaha feminisme untuk mendenotasikan perempuan sebagai *common identity* gagal sebagai bentuk representasi karena pada akhirnya membuka situs kontestasi. Persepsi gender tidak selalu koheren dengan konteks sejarah yang berbeda. Karena itu problem gender menjadi tercerabut dari persimpangan antara politik dan kultural.

Pertanyaan tentang subjek penting di dalam politik feminisme karena diproduksi dari praktek eksklusi yang dioperasikan secara alamiah oleh struktur yuridis. Diskursus dialamiahkan melalui premis-premis fondasional yang melegitimasi hukum dari regulasi yang hegemonik. Feminisme harus memahami bagaimana kategori perempuan sebagai subjek feminisme diproduksi di dalam struktur kuasa. Asumsi politik awalnya yaitu feminisme memiliki basis universal dimana identitas dianggap melampaui kultur. Operasi perempuan menjadi singular menyangkut yang menindas dan ditindas di dalam patriarki. Universalitas dan kesatuan subjek mengekang diskursus representasional. Subjek yang stabil menghapus keberagaman dari kategori perempuan. Patriarki yang universal gagal menjelaskan permasalahan kultural. Karena itu status universal perempuan di dalam feminisme justru menguatkan representasinya di dalam struktur dominan. Kerangka biner maskulin-feminin tidak saja bersifat eksklusif tetapi juga menyangkut ras, kelas dan etnis sehingga konsep perempuan yang terfaksionalisasi semakin sulit dipindahkan dari tatanan dominan.

Di dalam psikoanalisis Luce Irigaray tidak ingin mendefinisi feminisme, karena ketika feminisme mulai didefinisi maka konsep tersebut akan mengeksklusikan konsep yang lain. Selama ini subjektivitas perempuan dibiarkan didefinisi oleh maskulin. Psikoanalisis mengasumsikan adanya persamaan perkembangan psikologis antara perempuan dan laki-laki. Namun, ketika fase perkembangan tersebut dilewati terdapat penyimpangan dimana laki-laki mampu menyelesaikan kompleks oedipus namun perempuan terperangkap dalam fase imajiner. Perempuan harus menciptakan figur imajiner agar dia dapat mengganti figur konkretnya. Perempuan harus mengganti objek cinta seksual kepada ayah padahal objek cinta pertama adalah ibunya. Karena itu perempuan tidak memiliki akses pada subjektivitasnya, tidak dapat mengidentifikasi dirinya kecuali mereferensi kerangka imajiner dengan maskulin, dan tidak dapat berbicara dengan bahasanya sendiri kecuali mengikuti bahasa simbolik ayah. Perempuan ditandakan, menjadi pasif dan reseptif, karena itu perempuan terjebak di dalam identitasnya yang ambigu.

Di dalam simbolisasi maskulin terdapat bahasa falogosentrisme yang menyusun realitas berdasarkan oposisi biner yang hirarkis. Perempuan berada pada posisi kedua dari hirarki yang terbentuk. Irigaray mengajak perempuan untuk dapat keluar dari tatanan simbolik dominan dan menemukan subjektivitasnya sendiri. Dengan kerangka imajiner yang ditinggali perempuan bukan berarti dia tidak dapat menciptakan apapun. Perempuan tidak harus terus-menerus menjadi objek spekulasi yang dilakukan oleh simbol falik. Cara satu-satunya untuk melawan dominasi ekonomi persamaan di dalam simbol falik itu adalah dengan berpikir secara berbeda. Yaitu menciptakan subjektivitas perempuan dengan menciptakan bahasa perempuan.

Bahasa perempuan menciptakan interval dengan oposisi biner. Interval ini membuka ruang perbedaan dan mengeluarkan perempuan dari tatanan falogosentrisme. Perempuan harus berbicara sebagai subjek sehingga dapat menantang tatanan simbolik dominan. Perempuan tidak lagi tersembunyi, tidak memiliki referensi makna, tidak menjadi *linguistic absence* di dalam tatanan tersebut. Bahasa perempuan ini menurut penulis bukanlah strategi untuk berbicara dengan *écriture féminin* yang dibentuk secara gramatikal, yang berasal dari kontingensi tubuh perempuan. Tetapi merupakan cara untuk menantang tatanan simbolik, untuk dapat menciptakan persimpangan yang kreatif di dalam dominasi.

Bahasa perempuan adalah cara keluar dari tatanan simbolik ayah sehingga perempuan tidak didefinisi. Namun, Irigaray menyadari bahwa selama ini feminisme menekankan pada esensialisme sehingga tercipta pusat yang sama dengan tatanan maskulin. Feminisme mulai mendefinisi siapa perempuan sehingga konsep tersebut terjebak sebagai konsep yang ditandai oleh sistem persamaan. Sistem persamaan mengkonstruksi hasrat, pengharapan dan tindakan didasarkan atas politik persamaan. Feminisme masih menggunakan konsep falogosentrisme dimana pemikiran modern melandaskan dirinya pada oposisi biner menyangkut maskulin/feminin, terang/gelap, pusat/pinggir. Untuk menghindari feminisme yang memusat dan hegemonik, Irigaray menolak mendefinisi feminisme karena akan menciptakan tatanan dominan yang sama seperti tatanan yang didominasi maskulin.

Pembicaraan tentang destabilisasi adalah penting di dalam feminisme dimana konsep yang menciptakan subjek yang stabil dan menekankan pada pemusatan diskursus harus dibongkar dan digoyahkan.

Di dalam feminisme subjek utama adalah perempuan. Di sepanjang konstelasi sejarah dan teori yang membentuk feminisme terdapat pencarian akan identitas. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan subjek dan identitas perempuan di dalam feminisme. Namun, yang dilupakan oleh feminisme adalah sistem penyingkiran (eksklusi) itu sendiri. Perempuan diasumsikan berada pada posisi yang terabaikan di dalam sistem patriarki, padahal perempuan sendiri telah mengabaikan perempuan yang lain pada saat bersamaan. Sebagian aliran feminisme menjadi konsep yang hegemonik sehingga menolak perempuan 'yang lain' untuk dipertimbangkan di dalam perjuangan politik pembebasan perempuan.

Untuk menjadi tidak hegemonik feminisme harus mengalami kritik dari diri sendiri. Konseptualisasi feminisme yang hegemonik mulai didestabilisasi sehingga menciptakan pemaknaan baru. Tidak cukup hanya berpikir di luar tatanan simbolik dominan. Yang harus dilakukan justru menggoyahkan tatanan simbolik dominan agar perempuan tidak hanya dianggap sebagai *non truth of truth* tetapi juga kebenaran yang memiliki referensi literal. Perempuan selama ini dianggap sebagai *nontruth of truth*, namun ketidakbenaran itu juga merupakan kebenaran, hanya saja perempuan tidak memiliki referensi literalnya. Dengan menggoyahkan struktur dominan maka perempuan membuka ruang bagi penciptaan makna baru. Perempuan dapat mengakses subjektivitasnya maupun makna dari dirinya melalui tatanan simbolik yang tidak stabil. Artinya, kemungkinan itu diciptakan untuk perempuan ketika berusaha menyingkirkan konsep hegemonik.

Mencegah tatanan hegemonik berarti berusaha mensituasikan subjek sebagai relasi yang tidak timpang dengan yang lain (*I-Other*). Selama ini konsep diri di dalam modernitas dianggap sebagai yang mengendalikan segala sesuatu. Konsep diri *promethean* ini yang ingin dicapai oleh feminisme modern. Perjuangan utama mereka adalah pencapaian kemanusiaan yang utuh

sebagaimana dimiliki laki-laki. Sebisa mungkin perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

### **2.1. Perjuangan Persamaan Hak Feminisme Liberal Hubungannya dengan Subjek Promethean dan *Right Over The Good* di dalam Konsep Liberalisme**

Modernitas ditandai oleh proses rasionalisasi masyarakat dimana mereka mengganti pembicaraan tentang mitos dengan logos. Karena itu muncul ilmu pengetahuan alam yang semakin maju sehingga menggeser struktur masyarakat yang primitif. Modernitas percaya bahwa sejarah bersifat progresif dimana masyarakat akan meninggalkan hal yang irasional. Hal ini berkaitan dengan konsep subjek modern yang dilandaskan pada etika *promethean* dimana manusia dipandang sebagai makhluk yang tunduk pada alam sehingga manusia mengalami perubahan dari dalam dirinya dan lingkungannya.

Namun, semakin lama banyak orang skeptis dengan konsep modern khususnya yang diajukan oleh Liberalisme dan Marxisme. Kaum komunitarian menolak konsep tentang progresivitas sejarah yang dianggap sebagai ilusi karena sejarah menciptakan alur yang tidak timbal balik (irreversibel) sehingga melenyapkan kosakata moral yang juga menjadi bagian di dalam masyarakat. Marxisme gagal menerapkan prinsip dan ideologinya pada negara dunia ketiga karena tidak menerapkan ireversibilitas. Artinya, konsepsi modern tidak menyadari adanya hubungan yang timpang antara subjek dan 'yang lain' (*I-Other*). Karena itu kebanyakan konsep *promethean* dikritik karena memosisikan diri sebagai tuan sedangkan yang lain sebagai budak. (Benhabib: 71)

Subjek *promethean* bukan cerminan dari suatu komunitas yang terkonstitusi di dalamnya tetapi menyalahi pemahaman tentang subjek. Subjek *promethean* menekankan pada diri secara atomistik sehingga mengabaikan yang lain (*the other*). Subjek tersebut cenderung menguasai alam sehingga tidak menghormati subjek lain yang hidup dengan alam. Subjek *promethean* menggunakan logika instrumental dan gagal memahami subjek lain (*the other*) yang menggunakan logika non-instrumental. Homogenitas kemanusiaan ini

menghancurkan yang lain yang subjektivitasnya tidak berjarak dengan alam dan menolak rasio instrumental.

*The other* yang berlawanan dengan subjek *promethean* ini salah satunya adalah perempuan. Subjek *promethean* yang mengagungkan diri hanya ditujukan bagi masyarakat modern yang laki-laki tetapi tidak bagi perempuan. Perempuan tetap dianggap inferior, dan tidak dapat mengakses kemanusiaan yang utuh. Ketiadaan anggapan kemanusiaan yang utuh menyebabkan perempuan berada pada posisi yang subordinat dibanding laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan tidak dapat mengakses hak akan pendidikan, politik dan ekonomi yang setara.

Mary Wolstonecraft menganggap bahwa perempuan didomestikasi sehingga tidak mampu mengembangkan kapasitas nalarnya. Meskipun Wolstonecraft tidak menggunakan kata peran gender yang dikonstruksi namun penilaiannya jelas mengandaikan bahwa terdapat peran gender yang tidak seimbang. Dalam pemerintahan ataupun dunia luar, perempuan dianggap lebih inferior daripada laki-laki. Apa yang membuat laki-laki dipandang lebih mulia adalah rasionya. Sehingga kesempurnaan alam dan kapabilitas kebahagiaan perempuan, harus dikaitkan dengan rasio, kebaikan dan pengetahuan. Yang ketiganya menjadi derajat kemuliaan yang dimiliki laki-laki sebagai legitimasi masyarakat.

Feminis modern menekankan agar subjek perempuan sama dengan subjek laki-laki. Namun, tanpa disadari perempuan memiliki subjektivitas yang berbeda. Karena itu subjektivitas perempuan tidak cukup digambarkan dalam posisi yang persis dengan subjek laki-laki. Keyakinan modern akan subjektivitas membuat perempuan menginginkan diri yang dapat menciptakan pengetahuan dan kebenaran. Kepercayaan bahwa subjek manusia terpusat, vital dan inti di dalam kehidupan membuat feminis modern cenderung menginginkan posisi yang sama.

Pembicaraan feminisme liberal berkisar antara nalar dan keunikan perempuan sebagai manusia. Bagi kaum liberal pada saat itu nalar berguna untuk menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan diri manusia. Karena itu untuk merealisasikannya

diperlukan hak. Hak menunjukkan adanya otonomi individu untuk memilih sesuatu yang terbaik di dalam hidup. Karena itu status hak masih lebih ditinggikan dibanding kebaikan (*right over the good*). Kebebasan ini dijamin untuk kesejahteraan bersama dengan prioritas bahwa kebebasan tidak akan merusak kesejahteraan. (Tong: 16)

Kondisi dimana hak lebih diprioritaskan dibanding kebaikan membuat keadilan semakin sulit diwujudkan. Oleh sebab itu diperlukan lembaga sosial, ekonomi dan politik yang mampu mengakomodir segala kepentingan. Namun hal ini dibarengi dengan intervensi yang seminim mungkin dari negara. Intervensi ini menyangkut negara, organisasi, hingga keluarga. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak warganya. Kecuali jika terdapat perbedaan atau ketimpangan yang menyebabkan ketidakadilan.

Feminis liberal pun terbagi menjadi dua pandangan yang salah satunya menentang tentang kesejahteraan sedangkan yang lain mendukung liberalisme klasik. Liberalisme klasik menganjurkan negara untuk melindungi kebebasan sipil (seperti hak memilih, hak milik dan kebebasan berpendapat) serta memberi kesempatan yang setara. Sedangkan liberalisme egalitarian atau yang berorientasi pada kesejahteraan menekankan pada keadilan ekonomi. Negara perlu ikut andil untuk memberi kompensasi bagi mereka yang kurang beruntung. Kebanyakan feminisme liberal cenderung pada kesejahteraan dimana masyarakat dapat adil dan kebebasan berkembang. Namun, salah satu tujuan politik modern yang paling dekat dengan feminisme liberal adalah kesetaraan kesempatan.

Pada dasarnya, titik berangkat epistemologi yang berlandaskan filsafat politik liberalisme mengandung inkohereni konsep tentang diri. Konsep tentang diri ini dilandaskan pada sudut pandang *archimedean (the view from nowhere)*. Konsepsi tentang diri maupun perspektif epistemik yang diusung oleh kaum liberal pada dasarnya berlawanan satu sama lain. Sudut pandang tersebut ada pada diri yang tak terbebani (*unencumbered self*) yang menyangkut posisi *the right over the good*. (Benhabib: 72)

Masyarakat modern hidup di dalam idealisme liberal tentang perkembangan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Penindasan subjektivitas *the other* hampir sama dengan penguasaan alam. Namun, dialektika pencerahan akhirnya bergeser dari kritik rasio instrumental menuju kritik rasio komunikatif. Teori moral dan politik saat ini meluaskan pemahaman tentang diri yang berdiri di atas landasan keadilan. Terdapat inkohherensi mengenai justifikasi moral dan landasan normatif politik yang kontraktual antara agen yang bebas dan otonom.

Konsep tentang rasio komunikatif menempatkan diri sebagai hubungan intersubjektif sehingga dapat mengalami perkembangan di dalam proses komunikatif dengan yang lain (*the other*). Namun, rasio komunikatif ini belum diaplikasikan oleh feminis liberal yang mengusung kesetaraan hak. Karena problem perempuan masih berkisar pada penindasan maka sebisa mungkin mereka menggunakan cara-cara yang berorientasi pada tujuan dan hasil. Komunitarianisme sendiri menjadi kritik bagi liberalisme. Bentuk komunitarianisme di dalam feminisme muncul pada saat feminisme radikal mengusung jargon *the personal is political* dan *universal sisterhood*. Pada dasarnya komunitarian mengkritik epistemologi liberal yang menyangkut inkohherensi antara justifikasi moral dan landasan normatif kontraktual. Sedangkan kritik politik menyangkut pola penanaman diri sebagai *unencumbered self* dan prioritas hak di atas kebaikan.

Liberalisme bukanlah filsafat yang membahas tentang manusia tetapi filsafat yang membahas tentang politik. Dengan adopsi liberalisme yang kental di dalam feminisme maka politik perjuangan perempuan lebih difokuskan pada pembebasan. Pembebasan ini diwujudkan dengan menuntut kesetaraan hak politik karena dari situ perempuan dapat mentransformasi tatanan yang menindas di dalam masyarakat. Hal ini untuk mencapai inti dari liberalisme dimana tatanan masyarakat dianggap netral tanpa diskriminasi maupun ketimpangan. Feminisme masih berjuang demi satu tujuan yaitu penghapusan penindasan perempuan oleh patriarki.

Pada abad ke sembilan belas gerakan feminis liberal mulai membangun kesadaran bahwa perempuan harus memiliki hak pilih. Dengan memilih, perempuan dapat mentransformasi sistem dan struktur yang menindas, baik kelompok lain maupun kelompok perempuan. Suffragis (pembela hak suara perempuan) pada abad kesembilanbelas berjuang bersama dengan gerakan abolisi dimana kaum budak kulit hitam menuntut kebebasan.

Feminisme liberal ingin membebaskan perempuan dari sistem masyarakat patriarkal. Perempuan ingin dibebaskan dari tatanan humanisme universal yang sesungguhnya tidak pernah mengikutsertakan perempuan sebagai kategori manusia. Karena itu kebebasan individual perempuan diwujudkan melalui tuntutan hak dan kesetaraan. Perempuan perlu diakui sebagai manusia rasional yang setara dengan laki-laki dan berhak atas partisipasi secara politik maupun sosial. Feminisme liberal abad kedelapan belas dan sembilan belas bertumpu pada kenetralan gender dan penekanan akan kemanusiaan, rasionalitas, universalitas dan individualitas. Pada dasarnya feminisme liberal memiliki tujuan yang sama yaitu memahami kondisi perempuan di masyarakat sehingga membuat kehidupan perempuan dapat menjadi lebih baik.

Feminisme liberal gelombang kedua yang muncul pada tahun 1960 dan 1970 kemudian menguatkan konsep universalitas perempuan. Problem yang dimiliki oleh feminisme gelombang kedua masih sama dengan sebelumnya yaitu ingin membebaskan perempuan dari marginalitas sehingga perempuan menjadi bagian dari masyarakat bahkan dapat mentransformasi tatanan di dalamnya. Feminisme gelombang kedua berasumsi bahwa terdapat relasi antara penindasan dan kekuasaan. Namun, feminis ini masih menggunakan konsep kekuasaan yang berkuat pada supresi dan dominasi dalam skala luas (*power-over*). Dominasi ini terwujud di dalam patriarki khususnya di dalam kuasa kebenaran. Feminisme liberal gelombang kedua lebih meluaskan lagi rasionalitas dan individualitas yang muncul dari konsepsi pencerahan.

Dapat dilihat bahwa feminisme liberal melandaskan dirinya pada metanarasi yaitu melalui penjelasan tentang penindasan secara luas dan kuasa kebenaran yang universal dan terpusat serta penekanan pada kemanusiaan yang

utuh (personhood). Kekuasaan dipandang sebagai dominasi yang sifatnya represif dan beroperasi pada skala luas karena itu kekuasaan tersebut perlu dihancurkan dan dihilangkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Feminisme liberal meyakini bahwa terdapat esensi manusia secara universal di balik kekuasaan yang dapat diemansipasikan. Pemikiran feminis modern berkisar tentang:

1. Universalisme manusia, modernisme dikarakterisasi oleh humanisme yaitu kepercayaan bahwa manusia memiliki esensi yang membedakannya dengan binatang. U
  2. Modernisme menyetengahkan relasi antara masyarakat dan kekuasaan sebagai sesuatu yang difahami secara universal bahkan dianggap sebagai kebenaran. M
  3. Modernisme berkuat pada fundasionalisme dan penjelasan kebenaran dalam skala luas (makro) sehingga menyebabkan konsepsi kekuasaan sebagai sesuatu yang negatif. M
  4. Manusia menyangkut tindak kekuasaan yang difahami memiliki karakteristik universal, menyangkut yang menindas dan yang ditindas. Namun, terdapat kebebasan di balik kekuasaan karena itu kekuasaan harus dihancurkan sehingga individu yang ditindas dapat dibebaskan. M
- (Beasley, 2005: 28)

Modernisme menekankan pada rasio instrumental. Kemudian perempuan menginginkan rasio yang sama dengan jalan liberalisme dimana kesetaraan hak dijamin. Namun, liberalisme sendiri dikritik oleh komunitarianisme dengan mengajukan konsep rasio komunikatif. Komunitarianisme percaya bahwa identitas diri terkonstitusi di dalam hubungan intersubjektivitas. Saya menjadi saya jika menyangkut 'kita' di dalam komunitas berbicara dan bertindak. Individu tidak mendahului asosiasi, sebaliknya asosiasi mendefinisi siapa individu dan

akan jadi apa. Di dalam rasio komunikatif ditolak konsep deontologis dimana sesuatu dilakukan untuk tujuan tertentu serta ditolak adanya prioritas hak di atas kebaikan. Hal ini karena persepsi bahwa teori etis deontologis tidak memiliki hubungan dengan konsepsi diri. Kebaikan dasar dari masyarakat adalah keadilan, dan teori moral harus dilandaskan pada teori tentang kebaikan.

Setelah transisi modernitas dan lenyapnya sudut pandang yang teleologis maka kita harus berfokus pada pertanyaan tentang keadilan. Putusan keadilan merupakan inti dari putusan moral, karena itu pertanyaan tentang kehidupan yang baik berhubungan dengan pertanyaan tentang keadilan. Putusan deontologi bukan berarti tidak berhubungan dengan moral tetapi deontologi di dalam keadilan dan hak mendefinisi domain moral yang bermakna.

Feminisme tidak saja harus bergerak untuk memperjuangkan kesetaraan hak dan kehidupan yang lebih baik bagi perempuan tetapi juga harus dibarengi dengan kesepahaman yang dibangun di atas solidaritas untuk menghapuskan penindasan. Karena itu perjuangan feminisme mengalami transisi dari yang mempertanyakan tentang hak menjadi apa yang baik bagi perempuan. Dari pertanyaan tentang rasio instrumental menjadi lebih komunikatif membangun aliansi politik global. Feminisme mulai mempertanyakan keadilan tetapi untuk mempertanyakan kebaikan (*good life*) feminisme masih harus belajar. Karena selama ini menciptakan jarak reflektif untuk memahami hubungan antara diri-yang lain belum dilakukan. Sebagai bukti, feminisme menjadi hegemonik sehingga menciptakan domain eksklusif bagi perempuan yang lain. Hal ini karena *The other* dipandang sebagai bentuk umum (digeneralisasikan) sehingga tidak pernah menjadi fokus utama di dalam konsensus. Feminisme menjadi bentuk yang menyingkirkan perbedaan perempuan yang lain. Hal ini bermasalah karena bagaimana keadilan bisa tercapai jika hubungan antara diri-yang lain masih timpang, bahwa ketika berhubungan dengan putusan keadilan maka perempuan juga berurusan dengan domain moral.

Bagaimana kita bisa mengasumsikan bahwa putusan keadilan dan hak di dalamnya terdapat domain moral? Habermas menganggap bahwa hanya putusan keadilan yang memiliki struktur formal dimana putusan berhubungan dengan

kebaikan (*good life*) yang tidak memiliki bentuk sehingga sifatnya tidak formal. Karena itu justifikasi moral tidak memiliki landasan formal di dalam teori etika. Habermas mengusung evolusi putusan keadilan disangkutpautkan dengan evolusi dari hubungan diri-yang lain (*self-other*). Putusan keadilan merefleksikan hubungan diri-yang lain dimana pembentukan identitas diri dan putusan moral menyangkut keadilan yang satu sama lain saling berkaitan. Hal ini karena keadilan adalah kebaikan sosial yang *par excellence*. Evolusi dari hubungan diri-yang lain selalu dibarengi dengan perkembangan akan pemahaman diri dan evaluasi diri, dan kebaikan yang berkenaan dengan yang lain (*other regarding virtue*). Yang dilakukan oleh filsafat adalah memberi pemahaman terbaik di dalam argumentasi moral sehingga dapat menemukan kebenaran.

Di dalam justifikasi moral, individu tidak dapat melihat dirinya sebagai tak terbebani (*unencumbered self*). Tidak penting untuk mendefinisi dirinya secara independen, yang penting adalah melekatkan definisi dirinya secara konstitutif di masyarakat. Dalam arti, identitas diri bukan berarti datang sebelum komunitas, bahwa identitas tersebut justru muncul dari komunitas. Di dalam memasuki posisi politik setiap individu tidak memasukinya berdasarkan posisi awal (*original position*). Di dalam etika komunikatif individu tidak berdiri di balik tudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Di dalam etika komunikatif terdapat pemahaman baru tentang diri yang menganggap bahwa otonomi moral bukan hanya menyangkut hak untuk menolak tradisi, agama dan dogma tetapi juga hak untuk menciptakan jarak antara diri dengan aturan sosial untuk menciptakan jarak yang refleksif (*reflexive role distance*).

Namun komunitarian seringkali gagal membedakan antara identitas yang dibentuk komunitas dan yang dihasilkan oleh konvensi sehingga menyebabkan adanya penerimaan identitas yang tidak kritis. Komunitarian cenderung menggabungkan antara signifikansi komunitas di dalam pembentukan identitas dengan konvensi sosial dimana moralitas dicocokkan (*social conformist*). Komunitarian kesulitan untuk membedakan penekanannya pada komunitas yang terkonstitusi di bawah landasan kecocokan sosial (*social conformism*), misalnya sudut pandang perempuan di dalam patriarki. Etika komunikatif meluaskan

pandangan tentang pribadi (*person*) sehingga menjadi terpusat (*center*) dan individu menciptakan jarak refleksif atau sudut pandang yang lain (*standpoint of others*). Asumsinya bahwa diri tidaklah lemah, individu memiliki jiwa bermoral yang dapat menciptakan sesuatu menjadi mungkin dan secara rasional diterima di dalam universalisme etika komunikatif.

Feminis lesbian mengekspresikan identifikasi perempuan yang memisahkan diri dengan perempuan heteroseksual. Feminis lesbian mengungkapkan bahwa hanya mereka yang lesbian yang dapat menjadi feminis. Penggabungan antara komunitas dan konvensi membuat kemunculan identitas menjadi kabur sehingga sebagian perempuan harus menanggalkan identitasnya untuk berbicara sebagai satu suara. Perempuan dalam perjuangannya harus mencocokkan diri dengan norma moral sosial yang dikonvensikan. Di satu sisi feminisme bergerak sebagai politik identitas tetapi di sisi lain bentuk komunalistik feminisme telah menanggalkan perbedaan identitas di antara perempuan. Akibatnya, feminisme mengalami keterpisahan atau separatisme akibat tidak memandang perempuan dengan cara berbeda melalui *standpoint of others*.

Feminis lesbian muncul untuk merespon kegagalan feminis heteroseksual dalam melihat ketertindasan yang dialami perempuan secara seksual. Mereka berusaha memahami cara berada perempuan yang menandai esensi perempuan. Feminis lesbian berharap dapat menciptakan masyarakat perempuan yang murni. Karena itu, lesbian dianggap sebagai ekspresi yang paling tepat di dalam feminisme. Lesbian harus menjadi feminis dan berjuang melawan penindasan perempuan begitu pula feminis harus menjadi lesbian jika mereka berharap supremasi laki-laki terhadap perempuan berakhir. (Miles:

Teori komunikatif harus memiliki komitmen substansif yang berdasarkan kepastian teoritis dimana statusnya tidak dapat lagi dipertanyakan atau diterima sebagai diskursus etika di dalam bentuk refleksif. Namun, preposisi dari diskursus ini dapat ditantang, dipertanyakan dan diperdebatkan. Sepanjang diskursus praktik tidak didefinisi berdasar perdebatan moral, sepanjang individu tidak harus mengabstraksikan dirinya dengan pelekatan identitas keseharian. Konsepsi tentang

kebijaksanaan hidup (*good life*) sama dengan konsepsi tentang keadilan (*justice*) dimana hubungan perdebatan intersubjektif dan refleksi dimungkinkan.

Kebanyakan kaum komunitarian menolak deontologi melalui aspek moralnya dan berargumen bahwa konsep keadilan menciptakan konsep kebaikan hidup. Argumentasi deontologi melalui aspek politik banyak dianut oleh liberalisme. Kritik bagi komunitarian ada di dalam asumsi politik deontologi dimana dua prinsip keadilan dan prioritas kebebasan dipertanyakan. Komunitarianisme dicurigai mengadvokasi homogenitas, unit sosial yang sama/tak-terbedakan, yang akhirnya memunculkan intoleransi, eksklusivisme, dan bentuk rasisme, seksisme dan etnisisme.

Melandaskan diri pada pengetahuan di berbagai hal yang menyangkut pengalaman perempuan bertendensi untuk menghomogenisasi perempuan sebagai kategori universal. Hal ini juga bertendensi mengunci struktur epistemologi feminis di dalam oposisi biner antara laki-laki dan perempuan yang dinaturalisasi oleh gender dan menghapus kategori sosial yang lain sebagai bersebrangan dengan perempuan yang telah didefinisi. (Zalewski, 2005: 55)

## **2.2. Gerakan Komunalistik Feminisme Radikal hubungannya dengan Komunitarianisme dan Keadilan Distributif**

Komunitarianisme berusaha merekonsiliasi yang personal dan yang politik. Sedangkan liberalisme memisahkan ranah personal dan ranah politik. Rekonsiliasi antara yang personal dan politik merupakan bentuk politik komunitarian (*integrasionis dan partisipatoris*).

Penyatuan ranah personal dan politik juga dilakukan oleh feminisme radikal ketika menghadapi permasalahan penindasan seksual. Bahwa tidak cukup menuntut kesetaraan hak dan menciptakan kesejahteraan jika penindasan seksual masih berlangsung. Untuk mengungkap penindasan seksual yang selalu terjadi di ranah privat sehingga dapat diadili secara hukum di ranah politik maka harus terjadi penyatuan kedua ranah tersebut. Penyatuan kedua ranah adalah untuk menghilangkan persepsi bahwa ranah privat lebih rendah dibanding ranah publik sehingga keberadaannya harus dilindungi dan tidak boleh diintervensi oleh

siapapun. Bagi liberalisme ranah privat ini dilindungi oleh negara, keberadaan maupun urusannya. Karena itu bagi liberalisme, penyatuan ranah ini menghilangkan kebebasan warga negara.

Berbeda dengan feminisme yang lebih melihat penyatuan dua ranah ini sebagai cara untuk menghapuskan sistem seks/gender di dalam patriarki. Patriarki adalah istilah yang mengikuti model marxist tentang eksploitasi yang didasarkan kelas dan berhubungan dengan kepemilikan (Sylvia Walby: 1992). Patriarki merupakan bentuk utama dari hirarki sosial. Patriarki menjadi tatanan dominan yang banyak dihuni laki-laki di ruang publik sehingga dengan mudah menindas perempuan di ruang privat.

Bagi Gayle Rubin sistem seks/gender bermakna sebagai suatu rangkaian pengaturan yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia. Sistem seks/gender saat ini mengacu pada patriarki karena menunjukkan hirarki di dalam gender serta dikuatkan oleh adanya dominasi laki-laki. Dominasi ini membangun serangkaian identitas yang berlaku untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan. Dalam kondisi ini masyarakat patriarkal berusaha meyakinkan bahwa konstruksi budaya di dalam perbedaan seksual adalah alamiah. Masyarakat menggunakan peran gender yang kaku dimana perempuan tetap pasif dan laki-laki aktif. Karena itu untuk melawan konstruksi perempuan harus disadarkan bahwa mereka diciptakan tidak untuk menjadi pasif.

Untuk menjadi politik keseluruhan yang berbicara bagi organisasi sosial secara general pergerakan perempuan harus menganut nilai yang dapat melawan nilai dominan. Mereka melawan nilai patriarkal dengan mengusung nilai femininitas. Transformasi yang dilakukan oleh feminis salah satunya menawarkan konsep *the personal is political* sebagai alat dan tujuan, kesetaraan perempuan, spesifisitas (perbedaan perempuan dengan laki-laki), komunalitas, serta diversitas sebagai elemen kunci politiknya. Kesemuanya dibentuk dalam visi perempuan (*women-centered*) (Miles: 1996, 15)

Kebanyakan perempuan mengalami penindasan akibat institusi yang diskriminatif. Institusi ini jelas menganut ideologi patriarkal dimana terdapat perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang dibesar-besarkan hanya untuk meyakinkan bahwa posisi perempuan subordinat. Millet melihat bahwa harus terdapat usaha untuk menghancurkan sistem seks/gender sebagai sumber opresi perempuan untuk menciptakan masyarakat baru yang menempatkan perempuan dan laki-laki setara di tiap tingkat eksistensi.

Problem dari individualisme, egoisme, anomali dan penyimpangan di dalam masyarakat modern dapat dipecahkan dengan memulihkan beberapa nilai koheren. Skema nilai ini menjadi kode sipil yang mengandung visi persahabatan dan solidaritas yang memberntuk karakter moral. Karakteristik dari sudut pandang para integrasionis menekankan pada revitalisasi nilai, reformasi nilai, regenerasi nilai, melalui solusi institusional. Partisipasionis menganggap bahwa masalah di masyarakat modern yaitu hilangnya rasa kepemilikan (*sense of belonging*), kesatuan (*oneness*) dan solidaritas, terlebih lagi hilangnya agensi politik. (Benhabib: 77)

Feminis radikal atau perbedaan gender (singular) merevaluasi nilai-nilai keperempuanan kembali sebagai identitas kelompok. Perbedaan tidak seharusnya dilihat sebagai inferioritas. Feminis perbedaan sangat mentransensdesikan perbedaan gender dan beralih dari kritik androsentrisme menuju gynosentrisme.

Feminis radikal menganggap komunalitas perempuan (kita) sebagai kelompok homogen. Feminis radikal melekatkan nilai positif bagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka menggarisbawahi nilai yang dianut dan disebarkan secara positif sebagai kategori perempuan. Dengan begitu perempuan mampu menemukan identitas femininnya dan esensi keperempuanannya secara otentik. Perempuan telah berbicara berdasarkan politik identitas yang menyangkut kategori perempuan. Di dalam teori gynosentrisme dunia dilihat melalui kacamata perbedaan pengalaman antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mengkritik sistem kuasa. (Beasley: 2005, 48)

Kekurangan akan agensi politik bukan konsekuensi dari pemisahan antara ranah personal dari ranah politik atau pembedaan masyarakat modern ke dalam politik, dan ekonomi. Kehilangan ini mungkin konsekuensi dari kontradiksi antara berbagai ruang yang berbeda yang menutup kemungkinan akan agensi di ruang satu terhadap landasan posisi seseorang di ruang yang lain. Atau mungkin keanggotaan di ranah yang berbeda menjadi eksklusif karena aktivitas yang ada di dalamnya, eksklusifitas itu berasal dari sistem (peran keibuan, aspirasi politik perempuan di ranah ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kenyataan bahwa publik tidak mendukung lebih baik). (Benhabib: 78)

Feminis radikal percaya bahwa perempuan harus melakukan transformasi untuk melawan tatanan dominan dan menciptakan struktur baru. Transformasi ini dilakukan untuk mengakhiri khususnya seksisme serta institusi opresif. Transformasi ini dapat dilakukan dengan mengafirmasi femininitas. Dengan ini perempuan dapat mengembangkan identitas positif keperempuanan dimana secara kolektif mereka dapat saling berbagi. Perempuan berusaha untuk mulai memahami masalah personalnya. Pemahaman ini diwujudkan di dalam identifikasi perempuan yang lebih universal dengan menyebarkan kebanggaan akan femininitas sebagai kekuatan potensial untuk melawan penindasan.

Feminis radikal menginginkan berbagai perempuan pada saat yang sama mengklaim keperempuanan mereka dan keterhubungan mereka dengan perempuan lain. Untuk menolak definisi yang dikonstruksi maka perempuan harus merevaluasi nilai-nilai mereka yang mengindikasikan kemanusiaan yang utuh (*personhood*). Karena itu feminis radikal mengusung konsep *sisterhood*. *Sisterhood* menantang struktur yang membuat perempuan terbagi berdasarkan kelas, ras, dan etnis yang membuat perempuan saling terpisah. Karena itu perlu adanya hubungan dengan perempuan 'yang lain'. *Sisterhood* atau solidaritas perempuan bekerja sama untuk mencapai humanitas (*common humanity*). Begitu pula bagi mereka yang masih terkungkung di dalam tradisi dan perempuan yang berada pada sisi tidak berdaya (dunia ketiga) untuk dapat bergabung di dalam solidaritas perempuan.

Kesanggupan perempuan untuk menciptakan aliansi politik dimana semua perempuan dapat berpartisipasi dan bergerak secara komunal menciptakan sudut pandang yang terintegrasi. Sudut pandang partisipasionis tidak memandang perbedaan sosial sebagai aspek yang harus dimunculkan. Tetapi justru mengadvokasi reduksi dari kontradiksi dan irasionalitas di atas berbagai ruang dan mengusung prinsip non-eksklusif keanggotaan di berbagai ruang tersebut. Misalnya dengan menumbuhkan kesadaran perempuan bahwa mereka sedang berada dalam ketertindasan yang sistematis dan bahwa perempuan memiliki kesamaan berdasarkan esensinya. Perbedaan perempuan berdasarkan kelas, ras, etnis sengaja tidak dimunculkan sehingga memberi kesan non-eksklusif untuk dapat merangkul seluruh golongan.

Komunitarian begitu juga feminisme radikal berusaha menciptakan keadilan distributif dimana sumber-sumber kesejahteraan dapat disebarkan dengan adil. Di dalam pembagian tersebut bisa saja terjadi ketidakadilan, kesempatan bisa saja tidak *equal* dalam arti sejauh mana individu dapat memanfaatkan kesempatan itu. Akibatnya perlu diadakan partisipasi agar perempuan pun mampu menyuarakan pendapatnya sehingga tercipta keadilan. Tindakan ini bisa diminimalisir dengan partisipasi dimana setiap orang mampu mencegah orang lain untuk berbuat tidak adil. Dengan saling mencegah ketidakadilan itu muncul ke permukaan maka tercipta prosedur yang adil. Hal ini berimplikasi pada bukan kesepakatan yang tercipta tetapi kepentingan lain yang banyak tercecer. Prosedur yang adil tidak lain harus memikirkan tentang *justice as fairness*. Hal ini terdiri dari prinsip-prinsip pelaksanaan keadilan distributif (tata-kelola struktur dan pola kepemilikan, kesempatan, keadilan sosial yang menyeluruh).

Feminisme radikal berlandaskan perjuangan politik yang singular. Kesetaraan di dalam feminisme mencerminkan komunalisme antara perempuan dan laki-laki. Pada akhirnya, kesetaraan sama dengan kesamaan, apa yang terlihat netral dan bias jender adalah bentuk konstruksi. Kesetaraan tidak dapat menciptakan keadilan gender begitu saja.

Dengan dihancurkannya sistem seks/gender maka perempuan dapat memperoleh keadilan. Karena itu menciptakan politik yang menggerakkan perempuan sebagai suatu kelompok yang beridentitas adalah penting. Namun keberadaan *universal sisterhood* yang berusaha merepresentasi semua perempuan juga memunculkan kepentingan yang tercecce. Permasalahan keadilan adalah menyangkut artikulasi kepentingan dimana partisipasi dapat mengurangi dominasi. Jika keadilan hanya berlaku bagi perempuan yang memiliki agensi politik sehingga dapat mengakses kepentingan mereka maka bagaimana dengan perempuan yang tidak memiliki agensi politik bahkan terbisukan. Permasalahan perempuan yang mencari keadilan dipertanyakan kembali, sudahkah keadilan tersebut mengakomodir kepentingan berbeda dari perempuan yang memiliki identitas berbeda? Tidak ada prinsip keadilan distributif yang dapat cocok untuk perangkat sosial. Sumber kesejahteraan dari masyarakat yang berbeda harus didistribusi untuk alasan yang berbeda, dengan prosedur yang berbeda, oleh agen yang berbeda, semua perbedaan ini muncul dari perbedaan pemahaman akan sumber sosial itu sendiri. Masyarakat mengoperasikan landasan yang berbeda dan pada saat bersamaan melancarkan prinsip eksklusif dari distributif.

Feminisme yang tumbuh di barat tidak menyadari bahwa terdapat relasi yang timpang atas kekuasaan dari negara dunia pertama atas negara dunia ketiga. Kondisi perempuan dunia ketiga bukan saja tidak terjadinya keadilan distributif tetapi lebih buruk kondisi mereka ditentukan oleh kondisi kekuasaan negara dunia pertama. Negara dunia pertama memiliki kendali atas kebijakan ekonomi, politik dan sosial negara dunia ketiga. Segala pengharapan dan cita-cita perempuan negara dunia ketiga sangat berbeda dengan perempuan negara dunia pertama. Karena itu keadilan yang berbeda harus didistribusi secara berbeda, melalui agen yang berbeda dengan landasan yang berbeda pula bagi berbagai kondisi dan situasi perempuan. Keadilan distributif yang berusaha mencari ketunggalan atau integrasi melalui partisipasi yang diasumsikan menyeluruh bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Keadilan distributif mampu diaplikasikan di berbagai ruang, muncul sebagai sesuatu yang bergantung pada kerangka filosofis yang dipilih. Partisipasi itu tidak benar-benar menyeluruh di dalam feminisme karena masih terdapat kelompok yang tidak dapat bersuara dan terbisukan dan juga

partisipasi tersebut direpresentasi secara total oleh feminisme barat. Penindasan yang berbeda tidak dapat dilihat oleh feminisme hegemonik sehingga tidak dapat menciptakan keadilan. Artinya, apa yang dirasakan adil oleh feminisme barat yang hegemonik belum tentu dikatakan adil bagi perempuan lain yang memiliki situasi dan kondisi sosial yang berbeda.

Masyarakat modern bukanlah komunitas yang terintegrasi dengan konsep tunggal tentang kebaikan manusia (*human good*) atau pemahaman yang tersebar di dalam komunitas politik, tetapi masyarakat modern ditandai oleh pluralitas sudut pandang tentang kebaikan (*good*). Seseorang dapat mendistribusikan sumber kesejahteraan melewati berbagai kelompok yang tidak dibangun berdasar prinsip moral yang sama. Kritik epistemik dari perspektif hak memunculkan individu (*right bearing individual*) sebagai kerangka filosofis dari komunitas, dan menganggapnya tidak saja sebagai kerangka metodologis tetapi juga hidup di dalam realitas politik (*living political reality*).

Kemunculan ruang publik yang otonom dari rasionalisasi politik sangat sentral di dalam proyek modern. Irasionalitas dari masyarakat modern muncul dari beberapa faktor yaitu akses pada ruang publik yang selalu dibatasi oleh permasalahan kelas, ras, etnis, gender, dan agama. Kuasa menjadi alasan individu untuk menciptakan batasan/penghalang bagi keadilan distributif. Tren masyarakat modern yaitu *simple equality* (mempersamakan secara sederhana) yang didominasi kuasa sebagai media untuk mengkoordinasikan aktivitasnya. Kuasa menyebabkan adanya prinsip otonomi di dalam kehidupan sosial dimana individu kehilangan agensi. Juga memunculkan sinisme, alienasi dan anomali. Individu jadi kesulitan mengembangkan rasa diri yang koheren dan komunitas di dalam kondisi modernitas.

## BAB III

### Memandang *Otherness* di dalam Konseptualisasi Feminisme Hegemonik

#### 3.1. Perbedaan antara *Generalized Other* dan *Concrete Other*

Selama ini feminisme bergantung pada bagaimana memposisikan subjeknya di dalam kondisi perbedaan. Ketika feminisme memandang subjek secara umum dan melandaskan pada kesamaan identitas (*common identity*) maka pada saat itu suara yang lain (*the other*) menghilang. Hubungan diri-yang lain (*I-Other*) harus dilandaskan pada sesuatu yang konkret bukan general. Karena pada akhirnya sudut pandang *otherness* yang general dipertanyakan kembali di dalam politik representasi feminisme. Ketika subjek feminisme (perempuan) tidak dianggap sebagai sesuatu yang konkret maka akan menyingkirkan perempuan yang lain. Perempuan yang lain ini kehilangan daya untuk merepresentasi dirinya. Posisi perempuan yang lain selalu direpresentasi dengan kerangka konseptual dominan oleh feminisme hegemonik. Di dalam irisan epistemik *veil of ignorance* yang lain (*The Other*) tidak dianggap hadir tetapi diabstraksikan dan diimajinasikan menjadi *generalized other*. Di dalam feminisme kondisi tersebut dilakukan demi menciptakan kesamaan persepsi dan tujuan untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan.

Dua hubungan diri-yang lain digambarkan dengan dua sudut pandang keberlainan. Yaitu, 'yang lain yang diumumkan' (*generalized other*) dan 'yang lain yang dipandang secara konkret' (*concrete other*). Perbedaan perspektif antara *generalized other* dan *concrete other* dibentuk berlawanan berdasar karakter dikotomis yang diwariskan di dalam konsep modern. *Generalized other* memandang individu sebagai makhluk rasional yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini dilakukan dengan mengabstraksikan identitas konkret dari yang lain (*the other*). Tetapi yang terpenting bukanlah apa yang membedakan kita dari yang lain tetapi bahwa kita sebagai makhluk yang rasional berada dalam kesatuan (*common*). Hubungan diri-yang lain diatur oleh norma kesetaraan dan saling timbal balik (*resiprositas*). Keduanya menyangkut apa yang kita harapkan

dan kita asumsikan terhadap mereka. Norma dari hubungan interaktif ini sangat penting di ruang publik dan di dalam institusi. (Benhabib: 159)

*Concrete other* memandang setiap orang sebagai makhluk rasional yang memiliki sejarah, identitas, dan emosi yang konkret. Sebagai sebuah komunitas kita membutuhkan yang lain. Hubungan diri dengan yang lain memunculkan perasaan saling melengkapi (*complementary reciprocity*). Perbedaan yang ada justru bersifat melengkapi ketimbang menyingkirkan (mengeksklusi) satu sama lain. Norma di dalam hubungan *the other* yang konkret berisi persahabatan, cinta dan kepedulian bukan saja bagi kemanusiaan tetapi juga kondisi kemanusiaan individu. (Benhabib: 160)

Di dalam teori moral modern *otherness* dianggap secara general. Kohlberg melandaskan diri pada sudut pandang *the other* sebagai subjek untuk menentukan putusan moral. Keseimbangan di dalam putusan moral menyangkut keadilan dan berhubungan dengan resiprositas, kesetaraan dan keadilan. Jika putusan moral melandaskan diri pada sudut pandang *the other* maka hal ini bertentangan dengan *veil of ignorance* yang disyaratkan bagi adanya universalitas putusan moral. Universalitas di dalam putusan moral mengandaikan kesempurnaan ketertimbalikkan (*reversibility*). Namun, *veil of ignorance* mengandaikan *otherness* yang digeneralisir. *Veil of ignorance* yaitu putusan yang dihasilkan dari sudut pandang yang mengabaikan identitas pesertanya, dibuat berdasarkan asumsi bahwa putusan haruslah membawa nilai yang maksimal bagi komunitas rasional.

Melandaskan diri pada sudut pandang *the other* tidak bertentangan dengan *veil of ignorance*, tetapi masalahnya ide tentang resiprositas dan keadilan dilandaskan pada *generalized other*. Melandaskan diri pada sudut pandang 'yang lain' bukanlah irisan epistemik di dalam *original position* di dalam teori Rawls. Masalahnya memandang *the other* sebagai yang konkret tidak relevan di dalam teori moral. Dilemma di dalam subjek Kohlbergian yaitu dia memposisikan subjek di luar *veil of ignorance* tetapi masih menyangkutkan adanya irisan epistemik. Di dalam dilema ini individu dan posisi moralnya direpresentasi dengan mengabstraksikan subjek berdasar sejarah naratif dirinya. Bagi Gilligan epistemologi dilemma moral Kohlbergian membuat perempuan tersingkir karena

berusaha membuat suara di dalam sebuah dilemma moral lebih kontekstual yang berdasarkan sudut pandang *the other* yang konkret.

Perempuan tidak dapat bersuara di dalam konsepsi moral modern yang universal. Perempuan dunia ketiga juga dibisukan oleh feminisme barat yang menggunakan konsep universal di dalam teorinya sehingga memandang *the other* secara abstrak dan imajiner di dalam irisan epistemik. Subjek perempuan negara dunia tidak dipandang secara konkret dimana mereka memiliki kesejarahan, pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Terdapat ketidakkohärenan secara epistemik ketika *the other* tidak dipandang secara konkret.

Baik Rawls maupun Kohlberg menganggap bahwa resiprositas moral mengambil sudut pandang *the other* secara imajinatif di bawah kondisi *veil of ignorance*. Karena itu *the other* tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang berbeda atau berjarak dari Diri. Hal ini sama seperti politik representasi feminisme yang mencoba mewakili semua perempuan sebagai *all women* yang memiliki tujuan yang sama. Di dalam teori kontraktualisme *the other* berasal dari konsekuensi dari abstraksi total identitasnya. Perbedaan perempuan diabaikan di dalam politik representasi yang mengandaikan perempuan sebagai konsep universal.

Feminisme mengusung *common identity* untuk menggerakkan politik pembebasan, padahal *common identity* tersebut mereduksi perbedaan. *Common identity* serupa dengan memandang yang lain sebagai *generalized other* bukan sebagai sesuatu yang konkret. Karena itu feminisme hegemonik yang menciptakan eksklusi bagi perempuan yang lain harus menghadapi kritik dari pinggirannya. Konseptualisasi feminisme dalam memposisikan subjeknya dan memandang *the other* secara general justru membisukan suara perempuan yang lain.

Keadilan (*justice*) dan kebaikan (*good life*) merupakan irisan di dalam domain otonomi moral. Otonomi memprivatisasi pengalaman perempuan sehingga menciptakan epistemologi yang buta akan *concrete other*. Epistemologi yang buta ini merupakan ketidakkohärenan di dalam teori moral universal. Di dalam *original position*, konsepsi tentang diri yang otonom disangkutpautkan

dengan *generalized other*. Asumsinya, tanpa titik berangkat *generalized other*, teori moral tidak mungkin terbentuk. Identitas kita sebagai *the other* yang konkret menyangkut identitas yang membedakan kita dari yang lain berdasar gender, ras, kelas, perbedaan budaya maupun etnis. Pertanyaannya, dapatkah teori moral dibentuk berdasarkan *the other* yang konkret tanpa menjadi rasis, seksis, dan diskriminatif? Tanpa titik berangkat *generalized other* maka teori keadilan tidak dapat dibentuk. Namun, bukankah kita adalah *the other* yang konkret? Bagaimana menciptakan teori moral yang menghormati *generalized other* tetapi juga memahami tentang identitas moral dari *concrete other*?

Pertanyaan ini serupa dengan konseptualisasi feminisme yang memandang *the other* secara umum. Perempuan yang lain tidak dipandang berdasarkan kesejarahan, ras, kelas maupun perbedaan identitas kulturalnya. Hal ini menyebabkan perempuan lain yang berada di dalam kondisi kekuasaan partikular seperti negara dunia ketiga harus menerima politik representasi dari feminisme Barat. perempuan kulit hitam harus menerima representasi seksualitas perempuan kulit putih padahal mereka memiliki seksualitas yang berbeda. perempuan kulit hitam maupun dunia ketiga tidak pernah dipandang berdasarkan keberbedaan. Seringkali keduanya justru tidak dihadirkan di dalam sejarah bahkan dibisukan suaranya. Karena itu kritik perempuan dunia ketiga maupun kulit hitam bisa dikatakan sebagai kritik cara pandang terhadap *the other* yang dilakukan oleh feminisme. Kritik tersebut juga menyentuh problem tidak adanya ruang dialog di antara perbedaan tersebut untuk memahami *the other* tidak saja secara general tetapi juga konkret.

Perbedaan antara *concrete* dan *generalized other* sama dengan perbedaan antara substitutionalis dengan interaktivis. Substitutionalis melandaskan pada *concrete other* yang menyangkut identitas sedangkan interaktivis menyatakan setiap *concrete other* adalah juga *generalized other*. Perbedaan antara substitutionalis dengan interaktivis dapat dilihat di dalam *original position*. *Original position* merepresentasi individu dalam mengusahakan kepentingannya.

Setiap individu diasumsikan tidak mengetahui kepentingannya berjarak dan terbedakan dari yang lain. *We were in the original position we must develop*

*considerable capacities for empathy and powers of communicating with others about what different human lives are like. Original position* bagi Rawls adalah pilihan rasional. Agen rasional Rawls tidaklah egois tetapi berdiri berdasarkan pengejawantahan diri yang dapat dinilai berdasarkan sudut pandang *the other* di dalam *veil of ignorance*. Di dalam tudung ketidaktahuan ini (*veil of ignorance*) perbedaan antara diri dan yang lain (*I-Other*) menghilang. (Benhabib: 165)

Karena itu mengapa Diri di dalam teori Rawls tidak dapat rasional dan memaksimalkan kepentingan? Apa yang membuat Diri berbicara seolah-olah tanpa pretensi (*disinterested*) di dalam mengusahakan kepentingan? Diri tidak mengetahui bahwa kepentingannya berbeda dengan yang lain. Apakah mereka dapat mengetahui kondisi mereka di balik *veil of ignorance*? Apakah setiap diri menyangkut kepentingan yang digeneralisasikan. Rawls langsung menanyakan bagaimana kita membayangkan distribusi dapat rasional jika kita tidak mengetahui siapa diri kita, apa kemampuan kita, kelas dan ras. Bagaimana menciptakan distribusi yang rasional jika kita tidak tahu bahwa masyarakat kita terdiri dari perempuan kulit hitam yang memiliki tiga anak. *Original position* harus menghadapi *otherness of the other* dimana perbedaannya tidak dapat direduksi. Teori Rawls menghormati keberlainan. Namun presuposisi Kantian memberatkan pada ekuivalensi diri dimana agen rasional mendominasi titik berangkat *concrete other*. Berpikir tentang diri di dalam *original position* bukanlah mengejawantahkan seseorang tetapi memandang setiap orang sebagai *concrete other*. Apakah benar-benar ada *concrete other* di dalam *original position* maupun *veil of ignorance*? (Benhabib: 1992, 159-161)

*Original position* merupakan irisan yang memunculkan prinsip keadilan. Di dalam *original position* kita berpura-pura tidak mengetahui siapa diri kita. Karena itu bagaimana kita dapat mengetahui siapa yang lain? Jawabannya yaitu kita membawa prasangka tentang yang lain (*the other*) di dalam *original position*. Prasangka dan asumsi ini kemudian tidak diaktifkan di dalam *veil of ignorance* sehingga *the other* dapat disituasikan secara sama. Karena itu terdapat simetri di dalam hubungan setiap orang dengan yang lain. Di dalam *original position* Diri mulai diimajinasikan berdasar asumsi dan prasangka di dalam kehidupan sehari-

hari. Asumsi dan prasangka ini tidak benar-benar menyatu tetapi didiskusikan di dalam dialog terbuka dengan *concrete other*. Karena itu sangat berbahaya jika ruang dialog bagi *the other* tidak diciptakan sebab akan mengakibatkan kesalahpahaman. Hanya di dalam dialog moral yang terbuka dan reflektif pemahaman akan keberlainan (*otherness*) terbentuk.

Kekonkretan dan keberlainan dari *concrete other* ini dapat diketahui dari hilangnya suara yang lain. Sudut pandang akan *concrete other* muncul melalui definisi diri yang diberi jarak. 'Yang lain' itulah yang memberi kita peringatan tentang kekonkretan dan keberlainan mereka. Tidak adanya usaha penerimaan, maupun dialog menandakan bahwa perbedaan *otherness of the other* diabaikan. Kemampuan untuk memperoleh titik berangkat yang lain bukanlah empati. Empati berarti dapat merasakan dengan atau bersama. Individu yang empatik kehilangan keluasan mentalitas. Dengan empati mereka gagal membuat batasan antara diri dan yang lain dimana *concrete other* dapat muncul di dalam jarak itu. Butuh suatu prinsip, insititusi dan prosedur untuk dapat mengartikulasikan suara yang lain.

Feminisme harus berurusan dengan perempuan yang berbeda identitas, kesejarahan, tradisi dan kebangsaan. Karena itu muncul feminisme perbedaan ras/etnis/imperialis yang mulai memperlakukan kategori perempuan sebagai 'yang lain' dan non-barat. Dengan identitas ras atau etnis feminisme menuntut pemahaman bahwa asumsi ketertindasan yang sama ternyata tidak dapat diterapkan di dalam prinsip kekuasaan partikular yang terdapat di dalam ras/etnis dan kondisi kolonialisme yang berbeda. Selama ini feminisme modern menganggap bahwa gender harus dilihat berdasarkan esensialisme (keberadaan feminin yang ajeg). Hal ini membuat perempuan terkategori sehingga subjek feminisme tersingkir. Keperempuanan (*womanhood*) yang ditawarkan oleh feminisme modern dilandaskan pada konsep manusia universal yang didominasi kerangka maskulin. Feminisme tidak lain menjadi ruang pemeliharaan konsep maskulin dan aksis kekuasaan yang lain seperti ras/etnis/imperialisme.

Feminisme perbedaan menantang esensialisme yang mengkonsepkan identitas ajeg sebagai basis politik justru tidak memberi suara bagi kelompok

pinggiran. Feminisme perbedaan juga menolak diskursus yang berpusat pada perempuan, khususnya perempuan dengan identitas yang dominan sehingga melupakan perempuan dengan identitas yang lain. Penolakan terhadap diskursus dominan, pemusatan perempuan, dan esensialisme memberi jalan keluar bagi permasalahan marjinalisasi identitas.

**Tabel 3.2. Perbandingan Feminisme Modern (Women Centered) dengan Feminisme Posmodern (Perbedaan Gender/Seksualitas)<sup>1</sup>**

Modern	Posmodern
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fokus pada perbedaan antara perempuan dan laki-laki</li> <li>▪ Menghubungkan komunalitas perempuan dengan 'yang lain': Berbagi pengalaman keperempuanan (<i>womanhood</i>)</li> <li>▪ Berusaha memberi nilai positif bagi identitas marginal: perempuan</li> <li>▪ Diskursus '<i>Women Centered</i>'</li> <li>▪ Terdiri dari feminis radikal, sosialis dan psikoanalisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perempuan sebagai simbol '<i>Otherness</i>' yang memiliki perbedaan dari norma dominan</li> <li>▪ Perempuan secara sosial berbagi simbol berdasarkan lokalitasnya sebagai yang marginal</li> <li>▪ Tidak ada identitas partikular</li> <li>▪ Afirmasi femininitas dan tubuh perempuan sebagai simbol yang melawan standar universal (maskulin)</li> <li>▪ Posmodern dipengaruhi oleh feminis psikoanalitik</li> </ul>

<sup>1</sup> Tabel ini diadaptasi dari Tabel 4.1. Feminisme Perbedaan Gender: 'Women Centered' Modernis hingga Perbedaan Gender/Seksualitas Posmodern oleh Chris Beasley, *Gender and Sexuality: Critical Theories, Critical Thinkers*, (London: Sage Publication, 2005)

### 3.2. Resistensi dan Disonansi di dalam Politik Representasi Feminisme

Sebagai yang terurai di dalam bab sebelumnya bahwa feminisme tidak dapat merepresentasi semua kepentingan dan identitas perempuan. Feminisme justru menciptakan ruang eksklusif bagi perempuan yang lain. Penekanan perempuan sebagai pusat kajian dipertanyakan kembali, perempuan yang mana? Definisi feminisme juga dibongkar kembali, definisi atas apa? Karena feminisme ternyata tidak saja bermain di dalam kuasa seks/gender atau dominasi laki-laki tetapi juga ranah ras, kelas dan imperialisme. Ruang teoritis feminisme dicurigai bersifat hegemonik karena merepresentasi Barat dan mengobjektifikasi non-Barat. Perempuan non-barat disisakan di dalam ruang tanpa nama yang tak-teridentifikasi. Perempuan yang berbeda ini berada di ranah *peripheral* yang menantang pusat, namun tetap dibiarkan bisu dan tidak didengar. Yang bisu ini tidak dapat direpresentasi secara transparan, subjek yang kesadarannya terdislokasi (tercerabut).

Permasalahan feminisme muncul menjadi permasalahan representasi. Teori feminisme menekankan pada representasi perempuan barat yang memiliki kebebasan terhadap seksualitasnya, kemandirian dan pilihan. Lebih mengerucut lagi representasi feminis liberal menekankan pada persamaan hak sehingga melupakan masalah seksualitas. Akibatnya perempuan lesbian tereksklusi dan terisolasi. Di dalam feminin mistik yang direpresentasi adalah perempuan kelas menengah dan heteroseksual. Resistensi feminis kulit hitam muncul di dalam feminisme radikal yang menekankan pada seksualitas perempuan kulit putih. Feminisme marxist terjebak ke dalam kolektivisme kesadaran kelas yang menindas heterogenitas. Perempuan diposisikan sebagai agen ekonomi yang berada pada posisi *conscious bearer* yang pada dasarnya tidak dapat dianggap homogen tetapi heterogen. Kelompok kesadaran kelas ini mendislokasi subjek sebagai yang koheren. Padahal subjek selalu terbiaskan oleh perbedaan (kelas, ras, etnis). Kolektivitas monolitik perempuan sebagai yang tertindas menjadi sistem eksklusif. Sedangkan politik inklusi menempatkan perempuan sebagai subjektivitas

terfragmen sehingga dapat berbicara untuk dirinya sendiri dengan melawan sistem monolitik persamaan.

Representasi berarti dapat berbicara untuk. Namun, para teoritis tidak pernah merepresentasi yang tertindas apalagi yang bisu. Subjek perempuan selalu dibicarakan di dalam kerangka konseptual dominan. Misalnya subjek perempuan dunia ketiga selalu tanpa nama sebagai *the other (self shadow)*. Akibatnya kelompok tertindas tidak pernah dapat direpresentasi karena tindakannya selalu jamak (*multiple*) *no theorizing intellectuals can represent those who act and struggle...subaltern stands revealed, the intellectual representing them as transparent* (Spivak: 70). Dapat dikatakan tidak ada lagi representasi di dalam feminisme selain produksi teoritis yang mengarah pada praktik. Kaum tertindas dapat berbicara untuk dirinya sendiri, tanpa representasi, tanpa penanda maupun struktur.

Konsep 'The Other' diciptakan oleh subjek kuasa yang tidak lain hanyalah sebuah mistifikasi. Kuasa mendislokasi subjek yang lain sebagai *the other* untuk menyelamatkan relasi hegemonik di dalam kondisi yang tetap seimbang. Pada akhirnya para intelektual barat melakukan kekerasan epistemik yang salah satunya melekatkan subjek kolonial sebagai *the other*. *Episteme operates its silence programming function, consider of map of exploitation and oppression* (Spivak: 76). Perempuan dunia ketiga maupun perempuan lain yang teresuksi berada pada margin (*silenced center*) yang menandakan adanya kekerasan epistemik.

Pertanyaannya dapatkah perempuan lain ini berbicara atas nama kelompoknya. Apakah disonansi suara feminis ini dapat didengar dan diterima. Tentunya, perempuan yang selama ini tersingkir memerlukan landasan yang baru dan teori yang berbeda dari wacana hegemonik feminisme modern. Dapatkah perempuan memperbaiki kekerasan epistemik yang telah lama dilakukan oleh elit kekuasaan sebagai juru bicara barat. Dapatkah feminisme menciptakan ruang yang tidak lagi mempertahankan kemurnian tetapi lebih menunjukkan keberagaman. Di antara sirkuit kekuasaan dunia pertama atas dunia ketiga, dapatkah kaum subaltern berbicara? *We must confront the following question: from socialized capital, inside or outside the circuit of epistemic violence of*

*imperialis law and education in an earlier economic text, can the subaltern speak? with what voice can the subaltern speak, how can we touch the consciousness of people ( Spivak: 78).*

Perempuan dunia ketiga dianggap *subaltern* yang tidak direpresentasi oleh intelektual sehingga menciptakan ruangnya sendiri untuk berbicara. *In the context of colonial production, the subaltern had no history, and cannot speak, the subaltern as female is even more deeply in shadow.* Perempuan terbisukan karena perbedaan ras dan kelas yang dikonstruksi secara ideologis. Hal ini menciptakan subjek yang dianggap tidak memiliki sejarah dan tidak bisa berbicara. Melalui kolonialisme negara dunia ketiga dieksploitasi. Subjek yang dieksploitasi kebanyakan tidak mengetahui dan tidak dapat berbicara. Mekanisme kuasa pada abad 18-19 dilindungi oleh imperialisme. Imperialisme mengakibatkan fenomena yang beragam menyangkut pengaturan ruang yang melandaskan pada *peripheral* (deteritorialisasi) (Spivak).

Gayatri Spivak menyebutnya sebagai strategi esensialisme yang menggunakan identitas kelompok untuk mencapai tujuan politik, dalam arti semua orang dapat berbicara dimana saja, berada pada posisi objektif di luar kekuasaan. Namun kadang juga harus berhadapan dengan resiko esensialisme untuk bertindak secara politik.

Homi Bhabha mengatakan bahwa Selama ini subjek kolonial selalu mengalami kesalahpahaman, salah interpretasi, salah pembacaan, pencerabutan, dan salah terjemahan. Proses ini disebut sebagai *enstellung* yaitu proses pemindahan (*process of displacement/ Enstellung*). *Colonial present is always ambivalent split between its appearance as original and authoritative and its articulation as repetition and difference.*

Kondisi munculnya resistensi bukanlah sebuah bentuk perlawanan, bukan oposisi dari tujuan politik tetapi, bukan negasi atau eksklusi dari budaya lain. Resistensi merupakan efek dari ambivalensi yang dibuat di dalam aturan penerimaan diskursus dominan. Ambivalensi ini mencoba untuk menggoyahkan posisi pusat yang selama ini dianggap stabil. Posisi Feminisme yang mengusung

keterpusatan perempuan rupanya ditentang oleh berbagai suara perempuan yang lain. Hal ini merupakan tanda bagi adanya destabilisasi akan kelompok dominan. Perempuan kulit hitam maupun perempuan dunia ketiga merupakan bentuk ambivalensi yang melancarkan kritik terhadap feminisme. Hal ini karena feminisme yang dominan cenderung menolak perbedaan dan melakukan tindak diskriminatif. Referensi dari diskriminasi selalu ditandai oleh proses pembagian subjektivitas dimana jejaknya tidak ditekan tetapi justru diulang sebagai sesuatu yang terus berbeda. Jejak yang diulang secara berbeda menimbulkan hibridisasi. Hibriditas muncul sebagai tanda bagi adanya produktivitas kuasa kolonial/dominan yang menggeser kejegan proses dominasi. Hibriditas kolonial merupakan artikulasi bagi ruang ambivalensi dimana ritme kuasa membuat objek menjadi tidak sama.

### **3.3. Disonansi Feminisme Dunia Ketiga (Poskolonial)**

Menurut Chandra Tapalde Mohanty, kolonisasi menggambarkan eksploitasi ekonomi yang kemudian digunakan oleh feminis sebagai pengalaman perempuan di dalam melawan gerakan perempuan kulit putih-individualis-barat yang dominan. Kolonisasi juga mengkarakterisasi segala sesuatu yang berhubungan dengan hirarki ekonomi dan politik ke arah diskursus budaya yang berhubungan dengan 'dunia ketiga'. Kolonisasi juga menjadi penyebab adanya penindasan dan pengeksploitasian terhadap yang terstruktur oleh dunia pertama terhadap dunia ke tiga. Istilah ini digunakan oleh feminis dunia ketiga untuk menunjukkan adanya supresi terhadap heterogenitas subjek perempuan.

Di dalam paragraf awal bab ini sudah dijelaskan bahwa terdapat permasalahan representasi barat<sup>2</sup> terhadap non-barat. Representasi menjadi permasalahan demografis. Bahwa dominasi representasi terjadi dari karakter

---

<sup>2</sup> Penggunaan kata feminisme Barat mengacu pada diskursus dan praktik politik yang hegemonik, singular dan homogen di dalam tujuan, cara dan kepentingan. Barat digunakan karena sifatnya yang primer. Kata feminis 'barat' tidak diartikan secara monolitik yang mengacu non-barat sebagai The Other. Penggunaan perbedaan antara dunia pertama dan dunia ketiga sebenarnya sangat rancu tetapi Mohanty mengatakan bahwa tidak ada 'kata' yang tepat untuk menunjukkan kategori yang didefinisi (kondisi penindasan di negara berkembang/miskin). Tidak menutup kemungkinan bahwa 'Barat' dilekatkan bagi mereka yang menggunakan diskursus hegemonik bahkan jika yang menggunakan adalah perempuan dunia ketiga. Atau sebaliknya, perempuan eropa dapat dikatakan feminis dunia ketiga jika menggunakan perspektif feminisme dunia ketiga.

regional, ekonomi, dan sosial yang berbeda dari area ke area. Konsep feminisme bukan saja menyangkut kuasa homogen yang universal (patriarki) tetapi juga meluas ke ranah ras, kelas, etnis dan imperialisme. Dari perkembangan kapitalisme di barat muncullah konsep kesadaran kelas yang kemudian meluas menjadi Aliansi Politik Global yang menggerakkan perjuangan kelas. Perempuan adalah *conscious bearer* (Spivak) dimana posisinya sebagai agen perubahan diletakkan. Tidak hanya aliansi politik global yang bermasalah tetapi juga feminisme internasional mulai menginvasi agenda politik negara dunia ketiga.

Ekstensifikasi kapitalisme berpengaruh pada negara kolonial yang sudah terbebaskan. Bahwa pada dasarnya negara bekas jajahan tidak pernah benar-benar bebas tetapi masih diidentifikasi dan didefinisi oleh representasi negara dunia pertama. Negara dunia ketiga selalu dijadikan lahan investasi, eksploitasi bahan mentah, target pemasaran, dan buruh murah. Sedangkan negara dunia pertama merupakan negara yang menanam investasi, melakukan ekspor besar-besaran dan mengeksploitasi alam negara dunia ketiga. Karena itu warga negara dunia ketiga masih mengalami penjajahan dengan adanya globalisasi dan pasar bebas.

Dengan penjejak historis dan geografis dapat ditemukan bahwa terdapat sirkuit penindasan. Sirkuit penindasan ini tidak hanya terlihat di bidang ekonomi tetapi juga secara epistemik dimana kaum intelektual dan elit negara dunia ketiga hanya menjadi kepanjangan tangan dari negara dunia pertama. Negara dunia pertama melakukan rejimasi dan standardisasi masyarakat dengan membentuk solidaritas melalui aliansi politik. Kaum elit menjadi informan dari intelektual negara dunia pertama sebagai representasi suara *'The Other'*. Namun, pada dasarnya para elit tidak dapat berbicara mewakili kaum yang terbisukan (subaltern yang heterogen). Mungkin para elit atau intelektual dapat mengukur kebisuan (*measuring silences*) itu namun mereka tidak dapat berbicara sebagai representasi *politic of the people* yang berada pada ruang *'diantara'* (*in betweeness*).

Perempuan dunia ketiga mengalami penindasan tidak saja secara fisik oleh dominasi laki-laki, kapitalisme, atau kolonialisme tetapi juga representasi perempuan yang didominasi oleh perempuan dunia pertama. Perempuan dunia ketiga tersingkir sebagai kaum marginal yang tidak memiliki suara dan

terbisukan. Melalui representasi perempuan barat yang memiliki kebebasan, dapat mengendalikan seksualitas, bahkan memiliki pilihan, perempuan dunia ketiga tersingkir sebagai yang bodoh, tidak berdaya, terkungkung adat, dan tertindas. Representasi feminis barat yang dominan berakibat pada strategi politik yang tidak tepat sasaran. Terlebih lagi dengan program pembangunan, perempuan dunia ketiga harus menerima efek negatif dengan pemakaian kontrasepsi, kebijakan aborsi dan pengentasan kemiskinan. Dengan keadaan yang dianggap terbelakang perempuan dunia ketiga didorong untuk sama berpendidiknya seperti perempuan barat.

Feminis barat mengasumsikan pembangunan sebagai kemajuan di bidang ekonomi. Perempuan terkena imbas kebijakan pembangunan ekonomi. Di negara berkembang perempuan dipandang sebagai kelompok yang terpengaruh oleh kebijakan ekonomi. Perempuan diasumsikan sebagai wajah dari kemiskinan. Karena itu perempuan harus menjadi penentu kemajuan pembangunan negara. Namun, feminis barat hanya mengambil garis lurus kesamaan kemiskinan antar negara, yang seharusnya perempuan lebih dipandang di dalam interaksinya yang kompleks menyangkut ras, kelas, keadaan ekonomi, atau ideologi. Perempuan dunia ketiga bukan perempuan sebagai kelompok yang koheren tetapi mereka hidup di dalam sistem kebijakan ekonomi yang partikular. Perempuan dunia ketiga digambarkan memiliki masalah dan kebutuhan tetapi sangat sedikit akses untuk menentukan pilihan dan kebebasan bertindak.

Penelitian feminis barat terhadap perempuan dunia ketiga semakin menguatkan bukti bahwa perempuan dianggap sebagai kelompok yang koheren. Status dan posisi perempuan diasumsikan dapat dibuktikan dengan sendirinya, karena perempuan hidup di dalam struktur yang sama yaitu agama, ekonomi, keluarga, dan sistem hukum. Perempuan dianggap sebagai kelompok koheren yang tidak dipandang berdasar ras, etnis, dan distruktur di dalam logika biner dimana perempuan selalu berlawanan dengan laki-laki. Di dalam relasi kuasa perempuan berada di kutub negatif, mengikuti aturan dan larangan serta dianggap seragam.

Isu perempuan dunia ketiga adalah privatisasi kelompok perempuan kulit berwarna, karena mereka selalu disisihkan di dalam pertemuan perempuan sedunia. Feminis kulit putih kehilangan kerjasama interaktif dengan perempuan dunia ketiga sehingga mereka tidak tahu lagi harus bertanya pada siapa, yang ingin dicapai feminis kulit putih hanyalah bagaimana menjadi feminis sejati. Karena itu, sulit bagi perempuan dunia ketiga untuk duduk bersama feminis kulit putih tanpa merasakan bahwa kehadiran kita seolah-olah hanya juru bicara bagi feminis barat yang berusaha menopengi seksisme dan rasisme. Kebisuan ini kadang menjadi alat untuk berbicara atau berpartisipasi. Menjadi suara bagi haknya sendiri, tanpa kebisuan yang lain, kebisuan saya tidak terdengar, dan terabaikan, kita tidak bersuara karena itu wacana ini ditujukan bagi perempuan yang terbisukan. (Trinh T Minha: 84)

Mohanty mencoba membongkar beberapa feminis barat yang menempatkan perempuan dunia ketiga sebagai konsep objektivikasi. Perempuan sebagai kategori analisis diteliti tidak hanya secara esensial tetapi juga secara sosiologis/antropologis universal. Perempuan dikarakterisasi sebagai kelompok singular yang harus membagi pengalaman penindasan. Apa yang mengikat semua perempuan adalah kesamaan di dalam penindasan. Dalam hal ini perempuan mengkonstruksi kelompoknya sendiri sekaligus menjadi subjek terhadap sejarahnya sendiri. Homogenitas perempuan ini disalahgunakan oleh sejarah sehingga tercipta cerminan perempuan sebagai yang tertindas, tidak berdaya, dan dilecehkan secara seksual. Bukannya menutupi ketidakberdayaan perempuan, feminis barat justru menguatkan bukti ketidakberdayaan perempuan dunia ketiga. Penekanan pada penindasan perempuan yang homogen sebagai suatu kelompok mencerminkan rata-rata perempuan dunia ketiga. Cara pendefinisian perempuan ini membawa mereka pada kondisi objektivikasi (sebagai objek yang dipengaruhi oleh institusi).

Sebagai contoh apa yang ditulis oleh Mary Daly di dalam *Gyn/Ecology* yang menganggap bahwa praktik *Sutte*<sup>3</sup> di dalam agama hindu, pengecilan kaki di

---

<sup>3</sup> Pembelaan terhadap praktik *Sutte* sebagai tradisi yang perlu dijejaki secara historis dan penolakan terhadap konsep Mary Daly dapat dilihat di dalam Uma Narayan, *Contesting Cultures*. (London:Routledge, 2000)

dalam budaya Cina, dan sunat perempuan di Afrika merupakan contoh ketidakberdayaan perempuan melawan sistem patriarki. Tidak saja perempuan ditentukan pikirannya oleh laki-laki tetapi bahkan dihancurkan ketubuhannya. Mary Daly menguniversalkan perempuan sebagai kategori korban dari kekuasaan laki-laki. Feminis ini masih menganggap bahwa perempuan sebagai yang homogen, tidak dipandang berdasarkan perbedaannya di dalam ranah ras/etnis. Mereka tidak melihat penyunatan, dan Sutte sebagai tradisi tetapi justru menganggapnya sebagai praktik yang mengungkung perempuan dan seksualitasnya. Mereka mengkategorikan perempuan sebagai objek yang melawan (*object who defend themselves*) sedangkan laki-laki sebagai subjek yang melakukan kekerasan (*subject who perpetrate violence*). Padahal tradisi Sutte dan penyunatan berhubungan dengan konteks historis yang partikular. Feminis barat hanya menganggap perempuan dunia ketiga yang memiliki tradisi sebagai konsep objektivikasi. Dengan metode penelitian *cross-cultural*<sup>4</sup> feminis barat berusaha menjustifikasi perempuan tanpa melihat konteks kesejarahannya.

Perempuan dunia ketiga dianggap sebagai kelompok homogen yang tidak memiliki kesadaran. Keberadaan, pengalaman dan suara perempuan dunia ketiga diabaikan. Perempuan dunia ketiga dianggap tidak berdaya atau korban. Perempuan dunia ketiga didefinisikan sebagai korban kekerasan laki-laki yang sudah dikonstruksikan secara global. Konsepsi ini membawa laki-laki sebagai yang memiliki kuasa sedangkan perempuan sebagai yang tak berdaya. Padahal kekerasan laki-laki seharusnya diteliti secara spesifik di dalam masyarakat yang berbeda (partikular).

Asumsi perempuan sebagai kategori homogen mempengaruhi relasi kuasa yang ditentukan oleh oposisi biner (menindas-ditindas). Hal ini menyebabkan perjuangan politik perempuan lebih kepada kepemilikan kekuasaan. Perempuan mulai mengadakan pembalikan diri dari yang teropresi menjadi yang memiliki

---

<sup>4</sup> Penelitian yang bertujuan untuk membagi pengetahuan penindasan perempuan di seluruh dunia dengan metodologi yang sama yaitu universalisme. Metodologi ini mendasarkan diri pada dominasi laki-laki dan eksploitasi perempuan. Universalisme menggunakan metode aritmetik yang tidak memandang faktor historis dan kultural. Metode penelitian ini selalu melandaskan pada generalisasi nature/culture, male/female, sebagai kategori yang terorganisasi.

kuasa. Menurut Mohanty, jika hal ini diaplikasikan pada perempuan dunia ketiga maka akan terjadi kolonisasi. Feminis barat merepresentasikan dirinya lebih maju dibandingkan perempuan dunia ketiga, mengakibatkan posisi feminis barat menjadi subjek sedangkan perempuan dunia ketiga menjadi objek (subjek di luar relasi sosial/ outsiders). Perempuan dunia ketiga dianggap 'The Other' yang berada pada posisi peripheral dimana barat menjadi pusat.

Konsepsi Barat membuat yang non-barat sebagai 'The Other'. Ketika mengkonstruksi *The Other* sebagai homogen yang kesadarannya tidak terdeteksi maka akan tercipta resistensi lokal. Resistensi tersebut muncul akibat hegemonisasi diskursus feminisme yang mengintervensi praktek politik perempuan dunia ketiga. Karena itu perempuan dunia ketiga ingin mendobrak diskursus hegemonik feminisme yang dipraktikkan dalam tujuan dan ideologi tertentu. Kritik perempuan dunia ketiga adalah mendeteritorialisasi konsepsi 'Barat'. Namun, seringkali suara perempuan dunia ketiga diabaikan dan tidak didengar hanya karena secara ekonomi negara dunia ketiga adalah bekas jajahan.

Perempuan, ketika berusaha memberitahu sesuatu, selalu dibiarkan tidak memiliki ruang berbicara dan diam membisu. Perempuan sebagai subjek yang pasif yang dibantu bersuara. Perempuan tidak masuk ke dalam tatanan norma yang diterima, selalu terpisah dari sejarah. Pada sisi terbaik, perempuan mampu mencapai diskursus dominan yang diciptakan laki-laki, namun pada akhirnya ia menjadi perempuan yang dibuat. Menjadi martir bagi dirinya karena menggunakan alat yang diciptakan laki-laki. Di sisi lain terdapat perempuan lain yang terinstitusionalisasi bahasa yang berbeda sehingga keberadaannya ditolak dan menunggu untuk sebuah ruang berbicara. Kemudian mencoba bertahan dengan menerima perbedaan dan membuatnya kuat. Perbedaan bukan sekedar berbeda dari yang lain tetapi menerima setiap kekurangan. Sebagian menoleransinya dengan baik tetapi hal ini tidak cukup karena juga berarti mengabaikan dirinya sendiri sebagai isu. Dengan sangat logis perempuan dunia pertama membuat kita (perempuan dunia ketiga) menyembunyikan nilai-nilai etnis di dalam batasan tempat kita (negara dunia ketiga). Hal ini merupakan

kebijakan untuk memisahkan negara berkembang. Sebuah taktik yang telah berubah sejak masa kolonial. (Trinh. T. Min-Ha: 80)

Melalui konsep *universal sisterhood* feminis barat mencoba menghapus perbedaan rasial, etnis dan kesejarahan kolonialisme, seolah-olah menjadi semacam teritori yang membatasi koalisi antar berbagai perbedaan. Perempuan diasumsikan sebagai *all women* yang tidak memiliki sejarah maupun tradisi. Diskursus feminis barat fokus kepada gerakan politik yang singular dan homogen. Feminis barat menekankan pada universalitas perempuan sehingga menghilangkan perbedaan di antara perempuan. Karena itu praktek politik feminisme khususnya Barat telah mendikte perempuan dunia ketiga.

Penekanan barat pada universalisasi etnis sangat berpengaruh terhadap kesadaran diri perempuan dunia ketiga yang telah lama didominasi. Feminis barat mengharamkan perbedaan seksual dan menuntut kesetaraan yang bagi perempuan dunia ketiga telah menyalahi konteks berdasar tradisi dan budaya. Hal ini menjadi bukti bahwa feminis barat telah mengabaikan perbedaan perempuan dunia ketiga. Perbedaan itu coba dihomogenisasi dan disistematisasi sebagai penindasan perempuan dunia ketiga. Penindasan tersebut adalah wacana hegemonik feminis barat yang berkuasa atas wacana feminis dunia ketiga. Penindasan ini terlihat dari betapa barat memiliki kendali atas orientasi, regularisasi, dan kebijakan negara berkembang. Karena itu tidak ada kuasa patriarkal yang universal yang ada hanya kuasa partikular di dalam analisis budaya dan kondisi sosial-ekonomi yang tersituasikan.

Akibat universalisasi, perempuan menjadi terkategori. Perempuan dicerminkan sebagai kelompok yang koheren, memiliki hasrat dan kepentingan yang sama, dilihat berdasar kelas, ras dan kondisi yang sama, melawan perbedaan seksual dan patriarki, kesemua konsep ini dapat diaplikasikan secara universal di dalam budaya yang berbeda. Pemerataan citra perempuan dunia ketiga secara esensial didasarkan pada femininitas mereka yang terkungkung dan keberadaan mereka sebagai dunia ketiga yang tidak berpendidikan, miskin, korban, terabaikan dan terkungkung tradisi. Hal ini bertentangan dengan pencitraan perempuan barat

sebagai yang independen, bebas dan memiliki kontrol terhadap tubuh serta seksualitasnya.

Di sepanjang pembentukan konsep perempuan sebagai kategori bagaimanakah feminisme menyediakan ruang bagi persimpangan ras, kultur, etnis, seks, dan gender. Persimpangan ini nyata adanya dan harus diperhatikan oleh feminisme modern untuk merefleksi kembali tujuan utama feminisme. Konsep teoritis feminisme mengalami resistensi oleh wacana *subaltern* yang berdiri pada posisi perempuan lain yang terbisukan. Eksklusi terus terjadi dari wacana barat menuju non-barat, bahwa kekerasan epistemik terjadi secara demografis. Feminisme tidak hanya menyangkut patriarki tetapi juga kolonialisme.

Kategori perempuan sebagai homogen dibuat untuk mendefinisikan perempuan lain khususnya dunia ketiga. Hal ini dapat diatasi dengan feminisme menerima bahwa tidak ada identitas murni yang ditunjukkan pada aksis perbedaan seksual maupun gender. Feminisme harus mempermasalahkan kategori yang bersifat eksklusif untuk kembali melihat perempuan sebagai beragam (*multiple*). Bahwa perempuan memiliki situasi dan posisi yang berbeda dalam pemahamannya terhadap ketertindasan. Kemudian feminisme mampu menerima bahwa tidak ada kekuasaan yang netral dimana semua orang dapat berbicara dan bertindak. Feminisme seharusnya peka terhadap partikularitas kekuasaan yang berbeda di setiap situs penindasan. Bahwa selama ini teori tidak sejalan dengan praktek politik. Feminisme masih berkuat pada penelaahan kembali relasi terhadap proses sosial dimana terdapat pelekatan identitas. Identitas dianggap sebagai titik pertemuan antara multiplisitas institusi sosial, diskursus dan praktik yang memposisikan perempuan sebagai subjek sosial dari masyarakat yang partikular dan individu yang disirkulasikan di dalam sosial.

Banyak wacana perempuan kulit putih yang menggunakan kondisi dan situasi perempuan non barat sebagai penelitian, perbandingan dan objektivikasi. Karena itu feminisme menuju resistensinya untuk melawan wacana dominan dengan membentuk wacana postkolonial. Wacana postkolonial cenderung memberi privilese pada pemosisian subjek yang marjinal dan hibriditas sebagai

landasan teori. Poskolonial merujuk pada cara untuk mereferensikan feminis terhadap negara non-barat yang telah mengalami kolonialisme. Feminisme postkolonial berusaha menunjukkan adanya relasi kuasa yang bekerja di dalam diskursus. Jika feminisme posmodern ingin mendestabilisasi kategori perempuan, gender dan definisi perempuan, feminisme postkolonial ingin menunjukkan perbedaan perempuan sehingga dapat meredefinisi identitas dan politik identitas.

Poskolonial merujuk pada kesejarahan yang dilokasikan berdasar usainya periode kolonisasi, dan bentuk globalisasi sebagai dekolonisasi yang tetap menyangkut pada relasi kuasa yang asimetris. Poskolonial dapat berarti juga ruang yang mengkonstruksi barat dan timur, margin dan pusat, untuk dipermasalahkan. Bagi feminis kulit putih hal ini adalah pergeseran perspektif. Ketika feminis kulit putih mengonsepan semua perempuan dalam sudut yang sempit maka bagaimana cara melihat landasan yang berbeda. Landasan yang berbeda dapat dimulai dengan menerima bahwa kita hidup di dalam ruang diaspora. Di dalam ruang yang tidak murni karena itu posisi subjek sebagai native<sup>5</sup> (juru bicara) dipertanyakan. (Gedalof: 4-5)

Feminis kulit putih harus mempertanyakan dirinya sebagai native yang menelaah semua ruang sebagai barat. Problemnnya yaitu bagaimana mendengarkan disonansi suara yang muncul dari perbedaan perempuan. Dari feminisme poskolonial dapat dicari posisi yang memperhitungkan perempuan yang tereksklusi tidak saja berdasar ras/etnis tetapi juga identitas mayoritas.

Feminisme seharusnya membangun ruang identitas bagi subjek yang berbeda agar dapat berbicara dan bertindak. Menurut Avtar Brah kaum yang diasporik atau minoritas di barat masih memiliki kewajiban untuk menamakan identitasnya dan menjelaskan posisi mereka di dalam hirarki kategori yang tidak pernah membiarkan keberagaman untuk diposisikan. Perempuan postkolonial dianggap sebagai outsider. Strategi untuk membongkar wacana feminis yaitu meredefinisi spesifisitas perempuan dan keperempuanan sebagai subjek, agensi,

---

<sup>5</sup> Lihat Trinh. T. Min-Ha, *Women, Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism*. (Bloomington: Indiana University Press, 1989)

universal, yang masih berlandaskan norma maskulin. Kemudian mendestabilisasi kategori identitas gender. Memikirkan kembali tentang kegunaan dan koherensi sistem seks/gender, nature/culture, kebineran yang banyak mewarnai teori feminis barat. Teori feminis adalah pembahasan tentang perempuan secara simultan berdasarkan keberbedaannya.

### 3.4. Resistensi Feminisme Kulit Hitam

Bell Hooks mengatakan bahwa kemunculan feminisme tidak lain merupakan bentuk kebangkitan feminis anglo-american. Feminisme selama ini didominasi oleh perempuan kulit putih. Dari konstelasi sejarah perempuan kulit hitam tidak pernah dianggap kehadirannya (absen) di dalam sejarah. Seolah-olah perempuan kulit hitam adalah kategori yang tak terlihat (*the silence of the oppressed*). Problem perempuan kulit hitam selalu dihubungkan dengan rasisme. Hal ini membuat perempuan kulit hitam tidak dapat menyuarakan perjuangannya di luar konteks rasisme.

Feminisme telah mengeksklusi perempuan kulit hitam. Melalui dominasi wacana perempuan kulit putih mengkonstruksi *herstory*<sup>6</sup>. Namun konsep ini mulai dipertanyakan, sejarah untuk siapa?

Perempuan kulit hitam harus melawan konstruksi ideologis yang dilekatkan terhadap seksualitasnya. Konsep gender dikonstruksi secara berbeda di dalam pendefinisian femininitas kulit putih dan kulit hitam. Stereotip 'hitam' menurunkan derajat perempuan kulit hitam ke tingkat paling rendah. Perempuan kulit hitam dianggap tidak memiliki kemanusiaan yang utuh tetapi justru kebinatangan. Tidak memiliki kemanusiaan berarti tidak bebas dan dapat dikontrol. Konsep kebinatangan membuat perempuan kulit hitam menjadi objek seksual bagi laki-laki kulit putih. Hal ini menyebabkan perempuan kulit hitam

---

<sup>6</sup> Muncul dari resistensi terhadap wacana patriarkal tentang kesejarahan yang memusatkan laki-laki sebagai pelaku sejarah (*history*). Di dalam feminisme pemusatan wacana kesejarahan laki-laki sentris diubah menjadi perempuan sentris (women centered) yaitu *herstory*. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran perempuan di dalam sejarah yang memiliki pengalaman yang berbeda dengan laki-laki. Namun, *herstory* merujuk pada 'kekitaan' perempuan yang homogen karena ditujukan untuk perempuan kulit putih, feminis, kelas menengah, dan memiliki politik agensi. Sedangkan keberadaan perempuan 'yang lain' tidak teridentifikasi.

memperjuangkan pemurnian stereotip seksualitasnya yang telah dikonstruksi secara berbeda. *White saw the sexual activity of the manumitted female slaves as further evidence to support their claim that black women were sexually loose and innately morally depraved.* (Hooks: 25)

Ketidakmampuan perempuan kulit hitam untuk berbicara di luar konteks rasisme berarti menyangkal adanya hubungan paralel antara gender, klasisme dan rasisme. Sebagai proses, klasisme dan rasisme seharusnya memiliki hubungan paralel karena keduanya mengkonstruksi perbedaan alamiah dan biologis. Kategori ras dan gender memiliki koherensi internal. Namun, paralelisme tidak dialami oleh perempuan kulit hitam karena posisi mereka dianggap sebagai subjek simultan penindasan patriarki, kelas dan ras, yang mengindikasikan marjinalitas. Terdapat representasi yang berbeda secara rasial di dalam gender. Perempuan kulit hitam telah ditindas di dalam bentuk gender-spesifik.

Perempuan kulit hitam tidak memiliki ruang untuk menamakan dirinya. Kalau pun ada ruang tersebut adalah ruang keempat setelah permasalahan ras, gender, dan klasisme. Dapat dilihat bahwa di dalam rasisme subjek yang dibicarakan adalah laki-laki, di dalam gender subjek satu-satunya adalah perempuan kulit putih, sedangkan di dalam kelas tidak tercantum permasalahan rasisme. Karena itulah perempuan kulit hitam berada pada ruang keempat dimana bersinggungan dengan ruang gender, kelas dan rasis. Ruang keempat ini menyisakan ruang kosong dimana terdapat dua kutub yaitu kulit hitam pada satu sisi dan perempuan di sisi lainnya. Wacana perempuan kulit hitam berada di ruang kritik yang melokasikan dirinya untuk dipertanyakan.

Feminisme kulit hitam mulai memosisikan diri sebagai perlawanan dari wacana hegemonik feminisme kulit putih. Selama ini konsep feminisme kulit putih telah dianggap sebagai ajeg, koheren dan konsisten baik terhadap tubuh dan seksualitasnya. Padahal perempuan distruktur di dalam perbedaan. Perempuan kulit hitam tidak ingin didengar, atau mengklaim pengetahuan absolut, tetapi, memunculkan cara baru dalam pengetahuan dengan menantang diskursus normatif dominan. Mereka ingin menunjukkan kekurangan sejarah, dan asumsi normatif yang diterima begitu saja di dalam diskursus dominan. Jika ditelusuri di

dalam sejarah, perempuan kulit hitam dibentuk sebagai produk ciptaan diskursus patriarki, kolonial dan poskolonial. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa perempuan kulit hitam tanpa politik agensi, sebagai korban pasif, yang menunggu dimaknai dan dinamai oleh ruang pemaknaan dominan. Perempuan kulit hitam bukan subjek melainkan objek dari sejarah (*herstory*).

Menurut Razia Aziz perempuan kulit hitam telah dimarjinalisasi di dalam feminisme. Feminisme melihat perbedaan sebagai kategori sehingga menganggap perempuan kulit hitam sebagai kelompok yang tidak heterogen. Feminisme barat berusaha menyesuaikan artikulasi perempuan kulit hitam dengan situasi yang dialami perempuan kulit putih. Pada akhirnya pergerakan perempuan menjadi opresif karena ketidakmampuan teori feminis untuk membicarakan pengalaman perempuan kulit hitam.

Perempuan kulit hitam ingin menunjukkan bahwa identitas mereka tidak pernah ajeg tetapi dibentuk dari berbagai interaksi sosial. Feminisme kulit hitam harus menghadapi hibriditas budaya<sup>7</sup> yang ditentukan oleh budaya dominan. Budaya minoritas harus menantang kehadiran yang secara sosial dikonstruksi yaitu homogenitas budaya yang merubah pengharapan, tingkah laku dan pengalaman perempuan kulit hitam. Karena itu budaya minor seharusnya membuat ruang kultural sendiri dimana mereka dapat mengaspirasikan kebutuhan dan mengartikulasikan keberagaman.

Menurut Nash Rasool, perempuan kulit hitam dihadirkan di dalam proses yang sedang berlangsung melawan praktik ideologi dimana gender dan kulit hitam adalah subjek yang dikonstruksi. Posisi ini membuat perempuan kulit hitam mengaktualisasi diri dan mendefinisi diri melalui politik identifikasi diri dengan melawan praktik opresif di dalam sejarah. Identitas diri tidak menandakan adanya identitas yang ajeg tetapi justru identitas yang berlangsung terus-menerus dan

---

<sup>7</sup> Hibriditas budaya dapat diartikan sebagai proses yang berlangsung di dalam masyarakat yang secara mendasar mengenalkan kehadiran, karena itu kulit hitam harus beradaptasi dan merubah budaya maupun kesadaran kultural agar merasa menjadi bagian dari budaya dominan. Untuk mencapai proses ini kaum minoritas harus melewati berbagai konflik, perjuangan, kontradiksi dan ambiguitas. Hibriditas kolonial berarti strategi yang didasarkan pada kemurnian kultural yang ditunjukkan untuk memantapkan status quo.

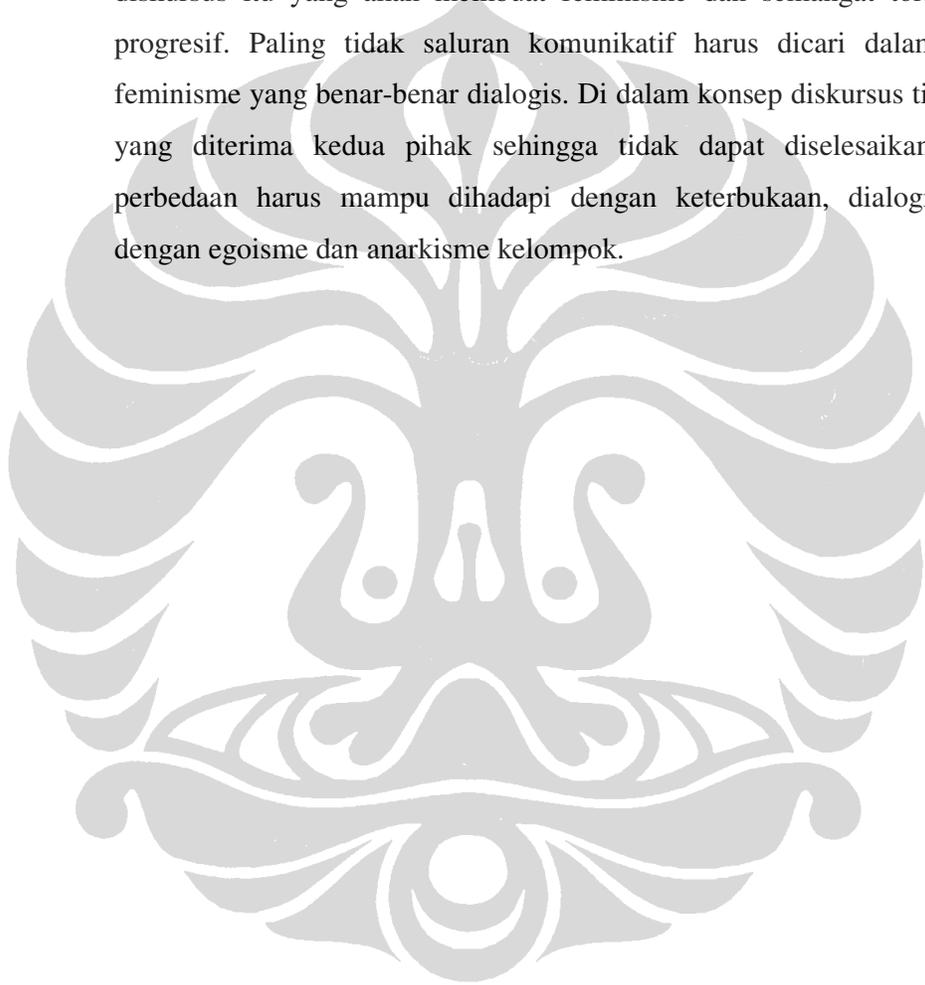
menjadi (*becoming*). Definisi diri terus muncul dengan kritik yang terus-menerus sehingga dicapai afirmasi diri dan validitas diri.

Pembahasan feminisme berkisar tentang permasalahan identitas. Realitas mempertanyakan *apakah identitas itu* sehingga perbedaan identitas menyebabkan terjadinya tindak diskriminatif bagi perempuan di dalam feminisme sendiri. Hal ini melandaskan diri pada kepercayaan bahwa tidak ada identitas di luar komunitas, sehingga identitas satu kelompok yang dibawa ke kelompok lain dianggap sebagai *the other*. Asumsinya, dengan penguatan identitas maka toleransi harus bisa berjalan. Konsep tentang identitas diri seseorang yang seperti ini sebenarnya memutilasi kontingenitas dan kemungkinan untuk adanya re-deskripsi diri. Identitas dilihat oleh feminisme sebagai proses yang bentuk dirinya ajeg dan tak pernah terfragmentasi. Manusia butuh untuk diterima oleh manusia lain, karena itu identitas memainkan peranan penting di dalam feminisme. Harus terdapat perubahan pandangan tentang identitas itu sendiri.

Identitas yang berbeda mensyaratkan toleransi, apakah juga menoleransi sesuatu yang menimbulkan kejahatan atau yang membahayakan kehidupan manusia. Apakah dengan menguatkan masing-masing identitas suatu *ethnic-group* maka toleransi yang sama progresifnya akan tercipta. Bagaimana dengan kebebasan individu yang ingin keluar dari suatu *ethnic groups*, apakah dijamin? Apakah kita harus menciptakan suatu wadah identitas yang memuat semua identitas marginal atau *the other* di dalamnya, seperti *veil of ignorance* yang diajukan John Rawls? Apakah perlu juga menciptakan sebuah metode *reasonable pluralism*.

Pada dasarnya, ketika seseorang berusaha menoleransi identitas asing di dalam kelompoknya maka hal itu didasarkan atas kesadaran akan perbedaan bukan kesamaan. Perempuan tidak dapat begitu saja diseragamkan tanpa memandang kondisi sosial-historis serta budaya lokal. Satu-satunya jurang terjadinya konflik adalah pencarian akan kesamaan, dan pencarian akan sebuah konsensus. Bisa jadi penciptaan sistem tertutup seperti itu justru akan menghasilkan eksklusifitas. Ketika feminisme berusaha merangkul seluruh identitas lain (*universal sisterhood*) bisa jadi ia justru menjadi eksklusif sehingga

identitas yang exit tidak lagi ditolerir. Mengapa kita harus mencari kesepakatan bersama jika kita tahu bahwa dialog yang diciptakan menjadi begitu manipulatif yang sesungguhnya hasil akhirnya telah dirancang. Mengapa tidak membuka ruang bagi perbedaan maupun *the other* yang konkret?. Mengapa harus memilih konsensus yang berakar dari semangat integrasi dan kesamaan dibanding mencari ketidaksepakatan yang berasal dari perbedaan. Pada dasarnya penciptaan diskursus itu yang akan membuat feminisme dan semangat toleransi menjadi progresif. Paling tidak saluran komunikatif harus dicari dalam pembahasan feminisme yang benar-benar dialogis. Di dalam konsep diskursus tidak ada aturan yang diterima kedua pihak sehingga tidak dapat diselesaikan. Karena itu, perbedaan harus mampu dihadapi dengan keterbukaan, dialogis, dan bukan dengan egoisme dan anarkisme kelompok.



## BAB IV

### Destabilisasi Pemusatan Diskursus Feminisme Hegemonik

Ketidakmampuan feminisme mengakomodir semua kepentingan akhirnya membuat perempuan yang lain tersingkir (eksklusi). Pada dasarnya feminisme memang tidak lagi dapat bergantung pada konsep modern. Feminisme tidak dapat menguniversalkan perempuan karena perempuan memiliki situasi dan posisi yang berbeda dalam pemahamannya terhadap ketertindasan. Karena itu harus ada perubahan di dalam feminisme. Tapi perubahan yang seperti apa? alat apa yang dapat berfungsi untuk membongkar dan mendestabilisasi konseptualisasi feminisme? Apakah posmodernisme mampu menjadi telaah kritik konseptualisasi feminisme?

#### 4.1. Pergeseran Paradigma di dalam Konseptualisasi Feminisme

Penulis menjabarkan melalui sejarah, betapa feminisme telah menyingkirkan perempuan. Hal ini kontradiktif dengan tujuan feminisme sebagai wacana yang ingin membebaskan perempuan. Konsep universalisme perempuan, pembebasan perempuan, solidaritas perempuan, menjadi opresif dimata perempuan kulit hitam dan perempuan dunia ketiga. Semakin feminisme mendefinisi dirinya secara fondasional, semakin ia menyingkirkan perempuan yang lain. Hal ini menunjukkan terdapat problem fondasionalisme di dalam konsep feminisme.

Namun, menurut Butler, tanpa fondasionalisme tersebut politik tidak dapat dibicarakan. Operasi eksklusi yang terjadi di dalam tubuh feminisme telah membawanya pada pola kontestasi. Operasi eksklusi perlu otoritas subjek, tidak mungkin perempuan kulit putih dapat berbicara atas nama feminisme tanpa membisukan yang lain. Dapat berbicara merupakan otoritas politik yang dimiliki oleh perempuan kulit putih terhadap kulit hitam maupun dunia ketiga. Subjek menjadi sebuah efek politik yang dibentuk dari diferensiasi dan operasi eksklusi. Pada akhirnya, subjektivitas yang fondasional memiliki efek politis yaitu

pembebasan. Subjek tidak tersituasikan di dalam sejarah tetapi dikonstruksi oleh normalisasi dan regulasi yang diinginkan oleh otoritas.

Di dalam posmodernisme yang mensyaratkan tiga hal yaitu kematian subjek, kematian sejarah dan kematian metafisika, bagaimana politik mampu dibangun di atas landasan yang kontingen? Politik tanpa subjek dan landasan tidak mungkin terwujud. Jika subjek telah mati, pertanyaannya adalah subjek yang mana? Namun, tidak mungkin juga melandaskan subjek yang stabil karena itu berarti menghilangkan oposisi di dalam politik. Artinya, kontestasi dibisukan. Karena itu subjek harus dikritik dan dipertanyakan kembali. Mempertanyakan subjek bukan berarti menegasinya tetapi menginterogasi proses konstruksinya.

Menurut Barret, kecenderungan posmodern untuk memotong beberapa konsep sentral di dalam konsep modern, telah menggeser pusat perdebatan teoritis dari analisis struktural ke sebuah analisis wacana. Teori feminisme mulai menggunakan analisis poststrukturalisme untuk menjelaskan kuasa dan meninggalkan model kuasa sosial (materialis klasik). Feminisme telah bergeser dari analisis kuasa yang determinis seperti patriarki ke arah budaya, dan politik agensi. Perdebatan tentang persamaan dan perbedaan menjadi ciri khas feminis barat namun sekarang feminisme menolak konsep modernisme dimana dia dibentuk.

Menurut Barret, perdebatan subjektivitas menunjukkan bahwa feminisme memerlukan konsepsi yang lebih baik tentang agensi dan identitas. Proses kritik diri ini membawa feminisme pada sebuah pergeseran. Namun, Barret mengatakan bahwa teori yang semakin kontemporer tidak selalu membawa feminisme ke arah teori yang lebih baik. Seberapa jauh seharusnya feminisme bertemu dengan perdebatan teoritis kontemporer? Poststrukturalisme telah membawa feminisme dari penekanan politis menjadi teoritis, karena itu feminisme jangan sampai terlalu jauh dari proyek orisinalnya.

Ada baiknya menjejaki bagaimana eksklusi bisa terjadi di dalam feminisme. Dari sudut pandang Irigaray, perempuan sebisa mungkin diberi akses pada subjektivitasnya. Dengan femininitas perempuan berusaha dikeluarkan dari

tatanan simbolik dominan. Dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan menyadari perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki. Dari perbedaan seksual ini feminisme dapat meluaskan lagi ke arah perbedaan lain seperti ras, kelas dan etnis. Walaupun Irigaray masih menekankan pada perbedaan yang hirarkis dengan mendahulukan perbedaan seksual dibanding ras/etnis namun ia berhasil membuka ruang bagi perbedaan.

### **1.1.1. *Otherness* dan Ruang Perbedaan di dalam Sudut Pandang**

#### **Luce Irigaray**

Pergeseran paradigma membantu feminisme untuk dapat membuka ruang perbedaan. Bagi penulis, ruang perbedaan dimungkinkan pertama kali oleh Luce Irigaray. Permasalahan feminisme yaitu tidak memahami perbedaan dan tidak melihat perempuan berdasarkan perbedaan pemahaman terhadap ketertindasan. Karena itu dia menawarkan cara keluar dari tatanan dominan dengan berusaha melihat perbedaan, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun ternyata perbedaan itu menciptakan ruang bagi yang lain, menerima keberadaan yang lain dan berusaha berdiri di luar posisi yang sudah ditentukan secara dominan.

Perbedaan pertama kali dilihat oleh Luce Irigaray di dalam struktur bahasa ketika didominasi oleh sistem persamaan. Ekonomi persamaan ini menyingkirkan perbedaan dan menciptakan oposisi biner. Hal inilah yang membuat perempuan tidak dianggap sebagai subjek. Lebih tepatnya tidak memiliki akses pada subjektivitasnya. Hal ini karena ketidakmampuannya untuk memasuki struktur bahasa dominan yang digunakan oleh simbol ayah. Lalu bagaimana perempuan dapat dianggap subjek? Yaitu dengan keluar dari tatanan simbolik ayah yang dominan dan mencoba meresymbolisasi diri perempuan lebih positif.

Luce Irigaray menganggap bahwa selama ini perempuan telah terjebak di dalam konsep maskulin. Perempuan (maternal dan feminin) terjebak di dalam interpretasi makna maskulin sehingga tidak dapat mengidentifikasi diri. *Meaning is regulated by paradigm and units of value that are in turn determined by male*

*subject* (Irigaray: 1985, 22). Karena itu perempuan harus menginternalisasi kerangka imajiner yang berlainan dari tatanan yang ada (simbol ayah).

Di dalam psikoanalisis Lacan, perempuan harus menginternalisasi di dalam ketidaksadarannya tatanan simbolik ayah (*The law of the father*) melalui bahasa. Namun, anak perempuan tidak melalui fase kastrasi sebagaimana laki-laki dan tidak menyeluruh menyelesaikan kompleks oedipalnya. Karena itu mereka ada di luar tatanan simbolik, di luar nalar dan bahasa serta terjebak di dalam fase imajiner. Imajiner merupakan fase pembentukan ego yang terus-menerus menyerupai citra ilusif yang dibayangkan. Karena perempuan tidak menginternalisasi hukum ayah sehingga ia tidak dapat mengekspresikan apa yang dirasakan atau tetap bisu di dalam tatanan simbolik.

Namun, keterjebakan perempuan di dalam fase imajinernya bukan berarti perempuan ter subordinat, tetapi justru perempuan dapat menunjukkan kreativitasnya. Perempuan dapat berbicara dengan bahasa feminin. Terperangkap di dalam ke-imajineran bukan berarti tidak dapat mengidentifikasi diri justru perempuan dapat mengidentifikasi dirinya melalui cerminan feminin-nya dan bukan dari refleksi maskulin. Melalui spekulum perempuan dapat terhindar dari jebakan representasi patriarkal. Bagi Irigaray perempuan dapat keluar dari cara pikir laki-laki yang penuh dengan falogosentrisme dan menemukan cara pikir dan bahasa yang merepresentasikan dirinya.

Pemisahan simbolis perempuan dan laki-laki mengekspresikan subordinasi antara manusia yang dipisahkan berdasarkan biologi...*the differences between the sexes are completely eclipsed by the agreements* (Irigaray: 1985, 25). Karena itu perempuan selalu dianggap kurang berinteleksi, tidak memiliki representasi simbol yang penuh, tidak dapat menjadi subjek transenden. Perempuan berada di dalam imajineritas yang terpecah sehingga kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tatanan morfologi ideal. Karena itu sebaiknya imajineritas itu diinterpretasi kembali secara berbeda dan positif agar perempuan dapat keluar dari tatanan maskulin. Irigaray berusaha melihat bahwa terdapat persimpangan yang kreatif antara simbol perempuan dan laki-laki. Persimpangan tersebut dapat

diartikan sebagai hubungan kreatif dimana tidak ada lagi dominasi atau subordinasi.

Daripada perempuan berusaha untuk menjadi dan berbicara seperti laki-laki lebih baik berbicara sebagai perempuan (*speaking as woman*). Ketika feminisme berbicara seperti laki-laki maka ia tidak memecah tatanan yang ada, ia tetap *'The other of the same'* bukan *'The other of the other'*. Namun ketika *parler femme* (bahasa perempuan) mulai digunakan maka sesungguhnya *loss of memory and ability to speak as a subject of enunciation to other pole of enunciation and to generate new responses in relation to other* (Whitford: 51). Maka berbicara bagi perempuan harus dalam posisi sebagai subjek karena *"women as subject must be involved in the construction of the world and the making of culture and sociopolitical reality"* (Whitford: 51). Dengan bahasa yang tepat perempuan dapat menentukan kapan dan dimana dapat mengekspresi *the feminin*-nya.

Ketika 'yang feminin' ingin diutarakan sebagai konsep maka ia harus masuk dalam representasi makna subjek maskulin. Karena itu, Irigaray menekankan pentingnya *female speaking subject*. Betapa pun sulitnya menemukan bahasa perempuan namun ia tidak berbicara dengan *meta language* yang digunakan laki-laki. Untuk membuat perubahan maka perempuan harus berbicara untuk dapat didengar. Terdapat perbedaan antara berbicara seperti perempuan dengan berbicara sebagai perempuan. Berbicara sebagai perempuan tidak hanya berimplikasi secara psikoanalisis tetapi juga secara sosial. Feminisme selama ini berbicara seperti laki-laki, sebagai tuan yang memegang kontrol atas makna, mengklaim kebenaran, objektivitas dan pengetahuan. Sedangkan berbicara seperti perempuan berarti menggeser makna, dan tidak dapat mengontrol kebenaran maupun pengetahuan (Whitford: 49-51).

Luce Irigaray berkuat pada pembicaraan perbedaan seksual antara perempuan dengan laki-laki. Dengan memberi privilese bagi yang feminin diharapkan perempuan mampu keluar dari tatanan maskulin. Karena selama ini perbedaan seksual telah menciptakan simbolisasi yang berbeda antara perempuan dengan laki-laki di dalam bahasa. Penekanan pada *female speaking subject* diharapkan mampu mendestabilisasi dan memindahkan pusat subjek. Hal ini

untuk menggantikan pemaknaan dominan di dalam tatanan maskulin (khususnya psikoanalisis) yang menganggap feminin sebagai yang subordinat.

Walaupun perbedaan ras, kelas dan etnis tidak dibahas, namun, Irigaray sudah membicarakan perbedaan antara diri dan yang lain (*The One-The Other*). Irigaray menganggap bahwa setiap perjuangan perempuan pasti memiliki perbedaan dan bergantung pada bentuk opresi yang mana yang membuat mereka tersadarkan. Pergerakan perempuan memiliki objektivitas berbeda dengan perempuan yang lain. Perbedaan harus dipikirkan di dalam model hubungan 'diri'-'yang lain' sehingga memberi predikat perempuan lebih positif.

Di dalam pemikiran Beauvoir perempuan dianggap sebagai *The Other*. Pada dasarnya Beauvoir telah mengkonstruksi perempuan di dalam sebuah definisi yang terjebak di dalam maskulin. Tidak ada *The Other* yang nyata sepanjang masih dikaitkan dengan 'Diri'. Di dalam konsep tersebut perempuan masih tereksklusi sebagai feminin spekulat yang didefinisi oleh subjek maskulin. Hal ini disebabkan oleh penekanan tatanan maskulin terhadap ekonomi persamaan. Dengan menganggap perempuan sebagai *The Other* berarti menghilangkan perempuan di dalam tataran maknawi atau sebagai kutub negatif dari oposisi biner.

Di dalam konsep Lacan terdapat eksklusi maternal dimana ibu dihilangkan sebagai konsep subjek, perempuan diletakkan di luar kerangka referensi. Sementara di dalam oposisi biner perempuan harus rela didefinisi oleh sistem maskulin. Hal ini yang membuat tatanan patriarkal disebut ekonomi persamaan atau *hom(m)osexuality...in which woman will be involved in the process of specularizing the phallus, begged to maintain the desire for the same that man has... Sexual difference is a derivation of the problematics of sameness, it is, now and forever, determined within the project, the projection, the sphere of representation, of the same* (Irigaray: 103).

Di dalam ekonomi persamaan ini terdapat perlawanan. Bagaimanapun perempuan harus berusaha menggoyahkan ekonomi persamaan ini sehingga menemukan ruang dimana perempuan dapat berbicara sebagai subjek. Irigaray berusaha menemukan ruang di-antara (interval dari oposisi biner) dimana

perbedaan dapat hadir tanpa dibatasi oleh logika biner. Menurut Derrida, perempuan adalah *differance* (yang menunda) sehingga berada di ruang di-antara. Hal ini menjadi lawan bagi ekonomi persamaan dimana ruang bagi 'The Other' selalu dikolonisasi oleh 'The One'. Ruang di antara ini ditandai oleh interval dimana kondisinya tak terungkap oleh *The One* maupun *The Other*. Irigaray menolak struktur biner yang tidak memberi ruang bagi imajineritas perempuan.

Interval dapat menjadi tanda-tanda dekonstruksi dimana mulai terjadi destabilisasi makna untuk dapat dilihat tanpa harus bergantung pada keajegan logosentrisme. Proyek utama Irigaray yaitu menemukan posisi berbicara perempuan sebagai subjek di dalam masyarakat dan menemukan model hubungan 'diri' dan 'diri-yang lain' yang bisa mentransformasi tatanan sosial tanpa terlibat di dalam dualisme.

*Woman is still the place, the whole of the place in which she can't take possession of herself as such. She is experienced as all-powerful precisely insofar as her differentiation makes her radically powerless. She is never here and now because it is she who sets up that eternal elsewhere from which the subject continues to draw his reserves, his re-sources, though without being able to recognize them/her....she that was dis-placed. She must continue to hold the place she constitutes for the subject, a place to which no eternal value can be assigned lest the subject remain paralyzed by irreplaceableness of his cathected investments. (Irigaray: 227)*

Ruang di antara diri (interval) membuka kemungkinan bagi keberadaan perempuan di luar ekonomi persamaan sehingga menghormati yang lain (*otherness*). Dari titik berangkat perbedaan seksual, Irigaray menemukan kemungkinan akan ruang perbedaan tercipta. Yang terpenting bukan hanya menemukan ruang perbedaan sehingga yang feminin dapat keluar dari pusat laki-laki tetapi juga menjaga hubungan perempuan dengan perempuan yang lain. Menciptakan hubungan itu berarti dapat melewati batasan individual. Tidak hanya memberi batasan pada tubuh tetapi juga memberi yang lain kontur. Seseorang dapat berpindah menuju hubungan diri dan yang lain dengan menerima porositas,

multiplisitas dan menghormati ruang perbedaan. Porositas dari subjek feminis kolektif hanya dapat diwujudkan dengan menghormati ruang perbedaan.

Tidak cukup perempuan berbicara sebagai subjek tetapi juga perbedaan yang dilandaskan pada tubuh perempuan dengan karakter yang *infinite* yaitu tidak terbatas dan tidak selesai. Multiplisitas perempuan kembali dapat dilihat di dalam tubuh perempuan. Perempuan memerlukan alternatif dari 'yang satu' (*The One*) yang mereduksi perempuan menjadi kohesi tubuh. Pada akhirnya perempuan memiliki diri yang jamak, mengalir, tidak linear dan tidak terbatas.

#### **4.1.2. Subjek dan Proses Eksklusi di dalam Feminisme**

Pertanyaan di awal skripsi ini adalah mengapa feminisme menyingkirkan perempuan sebagai satu-satunya subjek? Mengapa feminisme mengalami operasi eksklusi terhadap dirinya sendiri. Dari penjelasan sejarah telah terlihat bagaimana sesama perempuan saling menyingkirkan. Tetapi sistem eksklusi tersebut tidak dapat diartikulasikan di dalam feminisme. Hal ini hanya terlihat dari berbagai kritik yang muncul dari perempuan yang berada di pinggiran masyarakat seperti perempuan kulit hitam dan perempuan dunia ketiga. Karena itu feminisme secara tegas harus melakukan kritik terhadap dirinya sendiri. Tetapi yang masih harus dijawab adalah mengapa sistem eksklusi tersebut dapat terjadi di dalam tubuh feminisme. Apakah hal ini terjadi akibat feminisme mengadopsi konsep modern yang fondasional?

Penulis akan memulainya dengan permasalahan perempuan sebagai subjek feminisme. Bagaimana sebenarnya pola pemaknaan perempuan di dalam diskursus? pemaknaan perempuan sangat didefinisi oleh kerangka maskulin. Hal ini sudah dibicarakan juga oleh Irigaray bahwa kerangka maskulin selalu menyingkirkan subjek perempuan. Karena itu sebisa mungkin perempuan dapat berdiri di luar kerangka yang didefinisi oleh maskulin sehingga dapat menemukan pemaknaan subjektivitasnya sendiri. Irigaray mendorong perempuan untuk berbicara sebagai subjek (*speaking as subject*).

Berbeda dengan Irigaray yang menginginkan perempuan berbicara sebagai subjek, Butler justru menganggap bahwa subjek dikonstruksi. Permasalahannya konstruksi subjek tidak pernah stabil sehingga sulit untuk berbicara sebagai subjek di atas landasan yang kontingen. Subjek diregulasi, dinormalisasi melalui aturan tertentu di dalam relasi kuasa. Di dalam perbedaan seksual perempuan dan laki-laki dipisahkan berdasarkan perbedaan kelamin. Seolah-olah perbedaan tersebut adalah alamiah padahal seksualitas adalah kategori normatif yang diregularisasi oleh praktik yang memproduksi dan mematerialisasi tubuh. Seksualitas menjadi norma yang dipadatkan, direproduksi, dimaterialisasi di dalam tubuh dan dikembangkan sebagai subjektivitas.

Butler ingin mengatakan bahwa materialisasi tubuh di dalam perbedaan seksual tidak alamiah seperti yang diasumsikan. Dualitas jenis kelamin (sex) adalah wilayah pre-diskursif atau efek dari diskursus kultural yang dirancang oleh gender. Jenis kelamin (sex) merupakan salah satu norma yang mengkualifikasi tubuh di dalam domain kultural. Semakin norma diartikulasikan maka semakin penting bagi tubuh untuk dimaterialisasikan kembali. Namun, regularisasi norma harus mengalami kontestasi di dalamnya sehingga norma lain harus disingkirkan (seperti ras). Jenis kelamin (sex) bukan materi yang ajeg tetapi terus-menerus dimaterialisasi untuk menciptakan subjek.

Terdapat perbedaan seks (kelamin) dan gender. Perbedaan seks mengacu pada biologi dan dianggap alamiah sedangkan gender adalah perbedaan seks yang diinterpretasi secara kultural (*discursive cultural means*). Butler menentang kategori koheren atas seks, gender dan ras. Butler ingin menentang subjek yang hadir sebelum norma. 'Aku' yang berbicara dibentuk berdasar perbedaan jenis kelamin bersamaan dengan regulasi dan produksi norma. Bagi Foucault tata bahasa jenis kelamin (sex) mengandung relasi palsu antara dua kata yang opositif binerian dan diorganisasikan dalam regulasi yang menyingkirkan multiplisitas perbedaan seksual. Bagi Wittig pembelahan biner di dalam jenis kelamin (sex) memiliki tujuan reproduktif dari heteroseksualitas. Identifikasi perempuan sebagai jenis kelamin menciptakan kategori perempuan yang diseksualisasikan berdasarkan tubuhnya.

*Gender is not to culture as sex is to nature; gender is also the discursive/cultural means by which 'sexed nature' or a 'natural sex' is produced and established as 'pre-discursive', prior to culture, a politically neutral surface on which culture acts.*(Butler: 6-7)

Gender menyangkut konseptual episteme yang diuniversalisasikan. Gender tidak selalu cocok dengan karakter historis yang berlainan seperti ras, kelas etnis dan agama yang di dalamnya melekat identitas. Asumsi struktur hegemonik laki-laki gagal menjelaskan isu penindasan gender sesuai dengan konteks kultural. Spesifikasi yang feminin telah didekontekstualisasi berdasar ras, etnis, kelas dan hubungan kuasa yang di dalamnya melekat identitas. Menurut Benhabib, hasil dari posisi Butler berarti diri yang terpengaruhi gender tidak eksis, dan diri menjadi tereduksi di dalam seri pertunjukkan (performativitas).

Karena identitas gender terbentuk dari sebuah konstruksi diskursus maka tidak ada lagi identitas yang dapat diidentifikasi secara stabil. Butler menyebut identitas sebagai performativitas. Subjek ditunjukkan melalui performativitas yang berada di dalam konteks kuasa, pengetahuan dan subjek. Performativitas digunakan untuk menunjukkan tahap yang melampaui ontologis yang tujuannya menolak penekanan pada subjek yang terberi. Hambatan performativitas adalah diskursus kuasa itu sendiri yang membatasi apa, yang mana, yang dapat dipertunjukkan atau dimaterialisasi. Pertunjukkan dan materialisasi normatif itu tidak pernah stabil karena bekerja melalui eksklusi. Bagi Butler, sudah tidak penting lagi pembahasan tentang ontologi tetapi beralih pada epistemologi dimana sesuatu direpresentasi, dinarativisasi dan ditematisasi.

Butler percaya bahwa subjek dikonstruksi, diregulasi, dinormalisasi di dalam relasi kuasa. Subjek dilekatkan tidak secara penuh tetapi diproduksi terus menerus. Subjek dilekatkan di dalam operasi eksklusi yang berhubungan dengan pertanyaan siapa mengkuwalifikasi siapa? Bagi Foucault kebenaran tentang diri tidak hanya berkaitan dengan bentuk represi atau penyingkiran (eksklusi) tetapi juga produksi kuasa dan pengetahuan. Perempuan menjadi landasan bagi proses pelekatan identitas dimana mereka disingkirkan dan dimarjinalkan.

Sistem Lacanian gagal mengidentifikasi subjek dengan menganggap bahwa simbolik adalah konstruksi imajiner. Butler ingin mendekonstruksi Lacan dengan menunjukkan bahwa sistem tersebut dikonstruksi di dalam sejarah dan masyarakat berdasar relasi kuasa. Perbedaan seksual di dalam sistem Lacanian menunjukkan eksklusi terhadap perbedaan yang lain. Karena itu tidak cukup melokasikan ruang bagi yang feminin di dalam imajiner selama masih didominasi sistem simbolik. Percuma mencari jalan keluar dari sistem simbolik, yang harus dilakukan justru mendestabilisasi simbolik itu sendiri. Perbedaan antara simbolik dan imajiner tidak dapat dipastikan, apa yang dioperasikan di dalam simbolik bukan apa-apa kecuali sesuatu yang dialamiahkan sebagai hukum penandaan.

Subjek selalu dilekatkan oleh seperangkat prosedur (aturan) yang saling menyingkirkan (eksklusi) dan selektif. Kuasa beroperasi dari prosedur yang merancang siapa subjek yang bisa berbicara. Karena itu selalu ada posisi yang terbisukan ketika subjek lain berbicara. Hal ini menyangkut permasalahan otorisasi yang mengizinkan yang satu berbicara dan yang lain tidak.

Melalui sistem eksklusi apa subjek feminisme dikonstruksi? dan bagaimana domain eksklusi mengancam integritas feminisme? Feminisme menjadi proses yang mengalami kritik diri menyangkut proses yang mendestabilisasi identitas. Konstruksi subjek sebagai problem filosofis tidak sama dengan membuang subjek. Mendekonstruksi subjek bukan berarti menegasi atau membuang konsepnya. Mendekonstruksi bukan berarti menegasi tetapi mempertanyakan atau membuka istilah baru untuk digunakan kembali sehingga tidak diotorisasi (Butler: 42)

*To what a subject is already known, already fixed, and that ready made subject might enter the world to renegotiate its place. But if that very subject produces its coherence at the cost of its own complexity...then that subject forecloses the kinds of contestatory connections that might democratize the field of its own operation.*

Mendekonstruksi subjek feminisme berarti membebaskannya dari ontologi (maternal atau rasial). Penandaan perempuan sudah terlalu lama diterima begitu

saja sehingga apa yang ditetapkan sebagai referensi telah diajapkan, dinormalisasi, dimobilisasi, dalam posisi yang subordinat. Kategori perempuan sebagai kemungkinan resignifikasi adalah untuk meluaskan kemungkinan terhadap apa artinya menjadi perempuan sehingga meningkatkan kepekaan agensi.

#### **4.1.3. Dampak Politik dan Epistemologi Feminisme**

Posmodernisme mendestabilisasi landasan yang ajeg. Di dalamnya subjek diinterogasi keberadaannya. Posmodern menganggap bahwa integritas subjek tidak lagi ada. Pertanyaan Butler yaitu bagaimana membangun teori politik tanpa mensyaratkan subjek dan landasan yang jelas? Jika memang subjek dikonstruksi oleh normalisasi, dan ketika subjek hilang maka politik normatif juga menghilang. Pertanyaannya, apakah politik dapat bertahan tanpa landasan normatif? Teori politik tidak dapat dijelaskan jika subjek telah mati maupun tidak ada landasan yang tetap. Namun, memasukkan subjek yang stabil di dalam politik sama seperti mengklaim tidak ada oposisi, itu berarti membisukan kontestasi. Penekanan pada subjek berarti mempertanyakan proses konstruksinya, makna politik dan konsekuensinya.

Klaim landasan yang universal berarti kontestasi dan resignifikasi. Universalitas menandakan adanya posisi budaya hegemonik di dalam ranah sosial. Dalam hal ini, filsafat menegosiasikan konflik kuasa untuk melindungi posisi kuasa hegemonik dengan menciptakan metapolitik secara normatif. Totalisasi yang lebih jauh akan menciptakan eksklusi. Universalitas berarti terbuka secara permanen bagi kontestasi, dan kontingensi. Menotalkan konsep universal akan menghapus klaim yang tidak dapat diantisipasi. Hal ini menciptakan kategori fondasional yang terdiri dari kontes politik yang permanen (kontestasi fondasionalisme). (Butler: 36)

Pertanyaan tentang subjek merubah arah politik feminisme menjadi pola eksklusi. Namun, jika subjek dihapus maka politik tidak lagi dapat dibicarakan. Di dalam posmodernisme perubahan teoritis yang menghentikan perdebatan tentang landasan juga memunculkan kecemasan akan dibangunnya landasan baru yang semakin menyingkirkan subjek. Karena itu, perubahan bukan berarti menolak

subjek (agensi) tetapi mempertanyakan bagaimana ia digunakan. Hal ini sama seperti menentukan siapa yang akan menjadi subjek dan akan jadi apa mereka yang tereksklusi dari konstruksi.

Butler menentang hubungan agensi, identitas dan politik. Baginya, konsep agensi bergantung pada 'kelangsungan hidup subjek, dimana subjek dipahami memiliki eksistensi yang stabil'. Butler menolak bahwa terdapat hubungan antara agensi, wacana dan subjek. Dari pernyataan tersebut diasumsikan bahwa agensi hanya dapat dibangun melalui 'Diri' yang ditemukan di dalam wacana. Dengan demikian subjek yang dibentuk oleh wacana berarti ditentukan oleh wacana juga.

Bagi Butler, subjek yang dibentuk oleh wacana bukan berarti juga ditentukan oleh wacana. Agensi terdapat di dalam kemungkinan dari sejumlah variasi performatif gender. Tidak ada identitas gender di balik ekspresi gender, identitas gender dibentuk secara performatif oleh ekspresi yang dihasilkannya. Mengkonstitusi subjek bukan berarti mendeterminasinya melainkan membuka kemungkinan bagi agensi. Agensi berarti menempatkan seseorang sebagai aktor yang berkonfrontasi dengan wilayah eksternal politik. Agensi menolak konstruksi di dalam kuasa. Agensi selalu menjadi hak prerogatif di dalam politik. Di dalam kuasa, subjek diproduksi terus-menerus sehingga membuka kemungkinan bagi proses resignifikasi.

Perempuan harus dilihat sebagai subjek yang beragensi untuk dapat mewujudkan perubahan politis di dalam feminisme. Jika feminisme tidak mendefinisi atau mendeskripsi subjek atau kategori perempuan maka ia tidak dapat berbicara. Feminisme harus melekatkan perempuan sebagai penanda politiknya dalam hubungannya dengan kategori lain seperti ras. Proses politik lebih baik dipikirkan kembali sehingga politik feminis tidak hanya mereproduksi hubungan kuasa yang baru.

Butler menelaah politiknya di dalam kategori perempuan yang menimbulkan eksklusi. Di dalam posisi ini perempuan saling menyingkirkan dan menghapus (*erasure*) artikulasi subjek karena itu operasi eksklusi harus diselidiki. Kegagalan untuk mendeskripsikan konstituensi membuka kemungkinan

penandaan kembali (resignifikasi) politik. Penanda politik seperti perempuan dapat membalikkan dan memindahkan tujuan utama politik. Butler menantang stabilitas kategori identitas. Bagi Butler, gender tidak lain hanya identifikasi politik untuk mobilisasi ras atau seksualitas. Kritik terhadap subjek bukan berarti negasi terhadap subjek tetapi cara menginterogasi konstruksi yang given di dalam premis fundasionalis.

Telah diketahui bahwa, feminisme bekerja di dalam politik representasi dimana ia berusaha berbicara sebagai dan untuk perempuan. Kategori perempuan menjadi ruang terbuka bagi kontestasi, sebagai konstituen. Perempuan mulai menganggap bahwa kekhususan diri itu penting sehingga membedakan cara mengetahui mereka. Tetapi ketika feminisme menganggap bahwa konstituennya menyatu, pada dasarnya mereka telah memfaksionalisasikannya (memecah). Faksionalisasi itu terbukti dengan munculnya resistensi dan disonansi perempuan lain yang dianggap marjinal. Segala usaha penguniversalan kategori perempuan akan menciptakan faksionalisasi, sehingga identitas tidak dapat ditemukan. Kategori identitas tidak pernah deskriptif, tetapi selalu normatif, dan mengeksklusi. Jika perempuan merancang ruang perbedaan maka tidak bisa ditotalisasi atau dirangkum dalam kategori identitas yang deskriptif. (Butler: 49)

Basis pengetahuan feminis telah menghilangkan perbedaan perempuan dengan melandaskan pada kekhususan pengalaman perempuan. Epistemologi feminis mulai ditantang oleh feminis poskolonial dan kulit hitam. Epistemologi feminis tidak bisa mengakomodir pengalaman dan kepentingan perempuan yang berbeda. Karena itu menjadi perempuan dan memiliki pengalaman perempuan tidak cukup untuk menghasilkan pengetahuan feminis. Menurut Harding, pengetahuan dapat muncul dari posisi yang berlawanan dari yang menghasilkan pengetahuan feminis. Sudut pandang epistemologi feminis dicirikan dengan ketidakkonsistenan yang membuat kemungkinan mendasarkan sebuah epistemologi feminis secara logis menjadi tidak mungkin.

Pemikiran Butler tentang konstruksi identitas gender mempengaruhi epistemologi feminis. Titik berangkat epistemologi ini berusaha mengerti perempuan atau yang feminin sebagai subjek yang mampu mengetahui dengan

cara yang berbeda. Titik berangkat epistemologi berusaha menyadari bahwa aktivitas manusia bukan hanya struktur tetapi juga menciptakan batas pemahaman manusia. Apa yang kita lakukan menentukan apa yang kita tahu. Hal ini muncul dari kesadaran bahwa selama ini pengetahuan dikuasai oleh sistem maskulin.

Di dalam teori titik berangkat menurut Hartsock perempuan secara esensial tidak berbeda dengan laki-laki, namun kuasa patriarkal telah menciptakan perbedaan pengalaman dan rasa diri antara perempuan dan laki-laki. Karena perbedaan itu perempuan mengembangkan kemampuan yang berbeda di masyarakat. Perempuan memiliki interkoneksi dengan yang lain berdasar kesamaan pengalaman penindasan. Pengalaman berasal dari organisasi keluarga di dalam masyarakat patriarki yang memproduksi pribadi perempuan dan laki-laki yang berbeda. Namun, feminis *women-centered* masih menganggap bahwa kualitas feminin memberi model yang dapat mereformasi masyarakat. Perbedaan gender merupakan strategi pembalikan dimana kaum marginal dapat terangkat. Revaluasi positif ini membawa perempuan lebih menghargai dirinya dan merayakan kemampuan spesifik perempuan untuk mengenal dirinya.

Teori titik berangkat feminis mencoba menghapuskan dominasi laki-laki di dalam cara mengetahui dengan menawarkan alternatif cara mengetahui yang berdasarkan pengalaman perempuan yang unik. Dengan ini epistemologi di dalam feminisme ingin menunjukkan pengetahuan perempuan yang didapatnya dari pengalaman sehari-hari yang tidak dialami oleh laki-laki. Feminisme meletakkan 'perempuan' sebagai sebuah posisi dimana dia hidup.

Namun hal ini dikritik kemudian sebagai pengetahuan yang sama dominannya ketika perempuan dijadikan pusat pengetahuan. Pengetahuan didapat dari acuan pengalaman perempuan sehingga merekonstruksi pengetahuan yang memusat pada perempuan. Kemudian, pengetahuan ini diciptakan dengan asumsi pengalaman yang homogen dan universal di antara perempuan yang sebenarnya saling berbeda.

Identitas gender direpetisi dalam konteks yang telah dideferensiasi. Subjektivitas dikonstruksi di dalam praktek sehari-hari yang melandaskan

normalisasi dan regulasi kekuasaan. Operasi normalisasi membuat posisi perempuan menjadi problematis bagi epistemologi feminis. Selama ini epistemologi feminis memberi kekhususan bagi pengalaman dan pengetahuan perempuan. Jika subjektivitas perempuan saja dikonstruksi maka kekhususan pengalaman yang mana yang ingin dijadikan acuan epistemologi feminis.

Posmodernisme juga menentang wacana epistemologi dan mencoba meruntuhkan proyek epistemologi feminisme. Namun, feminisme tidak dapat begitu saja menikung pada posmodernisme karena posmodernisme justru membantu feminisme mendeesensialisasi dirinya. Menurut Fraser dan Nicholson posmodernisme memang menawarkan kritisisme namun dapat tergelincir ke dalam fondasionalisme. Menurut Walby, bagaimana pun posmodernisme berharga untuk menelaah teori feminisme yang harus berhadapan dengan relasi gender etnisitas dan kelas. Pada akhirnya feminisme harus meninggalkan konsep esensial untuk lebih memahami permasalahan kesejarahan dan budaya.



**Tabel 3.1. Perjalanan Konseptual dari Feminisme Modern hingga Posmodern**

#### **4.2. Feminisme dan Posmodernisme**

#### 4.2.1. Skeptisisme terhadap Penggabungan Feminisme dan Posmodernisme

Menurut Seyla Benhabib terdapat versi lemah dan versi kuat dari posmodernisme. Posmodernisme memiliki versi menentang konsep modern yaitu kematian subjek, kematian sejarah dan kematian metafisika. Kematian manusia (subjek) dikhususkan untuk penolakan terhadap konsep esensialisme tentang manusia. Manusia tidak saja dapat dianggap sebagai makhluk transenden tetapi juga dilihat berdasar sosial, sejarah dan bahasa. Kematian sejarah merupakan penolakan terhadap progresifitas sejarah yang selalu dianggap linear. Sejarah (*history*) dikhususkan bagi subjek yang mengandaikan totalitas, homogenitas, dan kesatuan. Sedangkan kematian metafisika berarti penolakan terhadap metafisika kehadiran yang mengkarakterisasi filsafat barat. Metafisika mengartikan realitas sebagai landasan kebenaran karena itu filsafat memiliki privilese terhadap penjelasan representasi kebenaran dengan klaim-klaim yang fondasional di dalam pengetahuan positif.

Teori feminis membuat versinya sendiri tentang kematian subjek, kematian sejarah dan kematian metafisika. Kematian subjek dianggap sebagai demistifikasi subjek laki-laki yang memiliki rasio. Posmodernisme mengkritik manusia sebagai subjek absolut yang dapat merubah secara kultural praktik diskursif. Feminisme mengklaim gender sebagai konteks yang penting di dalam mensituasikan subjek rasional yang netral dan universal. Perbedaan di dalam gender membentuk pengalaman dan subjektivitas diri. Filsafat barat menciptakan diskursus subjek sebagai yang identik dengan dirinya sendiri (*self identical*) sehingga melupakan kehadiran dan perbedaan yang lain.

Seyla Benhabib menganjurkan feminisme untuk hati-hati dalam memilih posmodernisme. Jika sepenuhnya posmodernisme diadopsi maka feminisme akan kehilangan idealisme dan utopianya. Terdapat dua versi di dalam posmodernisme yang harus diketahui yaitu versi kuat dan lemah. Posmodernisme versi kuat akan membuat feminisme mengalami kontradiksi dan menjadi tidak koheren. Sedangkan versi lemah posmodernisme hanya akan menciptakan teori kritis bagi

feminisme yaitu mengakhiri representasi episteme yang berlebihan dari konsep modern.

Versi kuat dari kematian subjek yaitu subjek tidak lagi menjadi tuan yang mengklaim kebenaran, bukan yang menandakan bahasa tetapi justru berada di luar bahasa. Subjek yang otonom, intensional, dan melandaskan refleksi diri akan hilang. Versi lemah dari kematian subjek akan mensituasikan subjek feminisme yaitu perempuan di dalam konteks sosial, linguistik dan sejarah yang beragam. Konsep ini hanya akan mendemistifikasi subjek absolut yang memiliki otonomi penuh, dan subjek dapat dilihat berdasar situasi yang berbeda. Versi ini sesuai dengan kondisi feminisme yang harus berhadapan dengan perbedaan budaya, kelas, etnis dan ras serta sejarah. Feminisme mengakui bahwa subjek masih terdeterminasi tetapi pada saat yang bersamaan juga melawan otonomi. Hal ini dapat dilihat di dalam pemikiran Judith Butler yang menolak dikotomi gender dan sex, dan mempertanyakan kelamin sebagai sesuatu yang terberi. Ia menganggap subjek dikonstruksi oleh kuasa melalui normalisasi dan regulasi.

Versi lemah dari kematian sejarah berarti mengakhiri narasi besar yang dikarakterisasi oleh esensialisme. Hal ini berhubungan dengan ditolaknya konsep *motherhood*, dan kajian perempuan berdasar lintas budaya yang universal. Feminisme menghindari kebenaran tunggal dari asumsi ketertindasan perempuan dan dominasi laki-laki. Dengan kata lain feminisme menolak klaim hegemonik dari kelompok tertentu yang berusaha merepresentasi sejarah. Feminisme sendiri pernah menciptakan narasi yang hegemonik sehingga mengalami perlawanan dari berbagai perempuan kulit hitam, lesbian dan dunia ketiga. Hal ini membuat feminisme harus menghadapi realitas perbedaan dimana permasalahan utama bukan hanya patriarki tetapi juga rasisme, klasisme dan imperialisme. Metanarasi yang dibuat feminisme mengabaikan perbedaan antara perempuan sebagai subjek.

Versi kuat kematian sejarah yaitu menolak segala narasi besar yang beroperasi pada tingkat makro menuju praktek sosial mikro. Menurut Seyla Benhabib menginterpretasi kematian narasi besar adalah suatu kesalahan. Bagaimana hubungan politik, dan sejarah akan dijelaskan tanpa ingatan tentang narasi besar tersebut? Kesejarahan perempuan tetap penting bagi perempuan

tradisional untuk mempertahankan perbedaannya dengan perempuan barat. Transvaluasi nilai di dalam feminisme dimaknai secara baru dalam menghadapi tradisionalitas dan kesejarahan perempuan. Jika sejarah dihilangkan dapatkah feminisme melandaskan dirinya?

Konsep posmodernisme yang menolak metafisika filsafat barat dibangun atas metafisika kehadiran. Realitas menjadi landasan kebenaran sedangkan filsafat memiliki kuasa untuk menjelaskan representasi kebenaran. Menurut Rorty, metafisika kehadiran seperti sebuah cermin dimana kebenaran didapat dari hal-hal konkret dari dunia luar. Namun, selama ini terdapat keretakan antara teori dan realitas. Kebenaran hanya menjadi permasalahan justifikasi dan validasi dari diskursus yang berkuasa. Karena itu perlu adanya investigasi terhadap validitas pengetahuan di dalam epistemologi yang menciptakan kondisi dimana klaim tertentu disahkan. Feminisme membutuhkan filsafat untuk menciptakan kritik terhadap klaim yang divalidasi serta menjawab tantangan kritik dari kelompok lain. Karena itu, feminisme dapat mengadopsi posmodernisme hanya secara teoritis, karena kritisisme sosial feminisme tidak mungkin terjadi tanpa menggunakan landasan filsafat. *The view of the social critic is never "the view from nowhere," but always the view of the one situated somewhere, in some culture, society, and tradition.*

#### **4.2.2. Feminisme dan Dekonstruksi**

Feminisme ketika bertemu dengan wacana besar cenderung akan melakukan persekutuan. Misalnya, feminisme bersekutu dengan konsep modern dan menggunakan wacana besarnya. Namun, hubungan feminisme dengan modernitas tidak muncul secara langsung tetapi melalui proses ambiguitas dan kontradiksi. Di satu sisi feminisme mengkritik modernitas tetapi di sisi lain dia memperkuatnya. Pada saat modernisme gagal memahami perbedaan dan harus menghadapi skeptisisme terhadap rasionalitas, maka hal ini membangkitkan posmodern. Feminisme mulai berhubungan dengan dekonstruksi untuk memeriksa kembali landasan epistemologis di dalam wacana.

Pertanyaan Gayatri Spivak yaitu bagaimana feminisme menggunakan dekonstruksi. Dekonstruksi tidak serta merta menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara feminisme dan posmodernisme. Dekonstruksi bukan berarti tidak dapat berbicara secara politik. Dekonstruksi justru dapat membuat program politik lebih berguna dengan melihat permasalahan lebih jernih. Untuk bertindak kita tidak dapat mengabaikan dekonstruksi. Dekonstruksi tidak bertujuan pada praksis tetapi menciptakan (*techne*). Karena itu kegunaan dekonstruksi bagi feminisme yaitu menegosiasikan kompleksitas permasalahan konseptual feminisme menyangkut hubungan patriarki dan teori feminisme sendiri.

Kritik feminisme terhadap metanarasi modern dimulai dengan pertemuan feminisme dengan posmodernisme. Dengan itu, posmodernisme mulai diberdayakan oleh feminisme untuk menghadapi teori besar patriarki yang memiliki hubungan dengan variasi sejarah dan budaya. Selama ini, pembicaraan tentang subjek yang terpusat telah direduksi ke dalam esensialisme. Padahal, esensialisme kurang melihat komponen lintas budaya dan perbedaan perempuan. Karena itu feminisme mulai meninggalkan perspektif modernisme yang melanggengkan otoritas monologis. Feminisme melewati suatu periode kritik diri dengan memperhatikan isu perbedaan. Analisis feminisme harus dibangun di atas wawasan yang dapat mengakomodir baik subjek modernisme yang belum terkonstruksi maupun posmodernisme yang menolak subjek. Hal ini disebabkan perempuan tidak pernah koheren dengan otonomi, rasionalitas atau agensi dari subjek yang belum dikonstruksi maupun yang telah didekonstruksi.

Gayatri Spivak menemukan bahwa hubungan antara feminisme dengan dekonstruksi adalah absurd. Absurditas ini muncul ketika kita mereduksi dekonstruksi sebagai narasi untuk memindahkan pusat subjektivitas perempuan (*decentered subject*). Karena itu sebagai narasi, dekonstruksi hanya menjadi cermin yang menampilkan kemustahilan sehingga tidak membantu apapun di dalam posisi politik. Namun, mengartikan dekonstruksi tidak semudah mengatakan bahwa sepanjang dekonstruksi mendesentralisasi subjek perempuan maka hal itu baik bagi feminisme.

Di dalam buku *The Ear of Other* yang ditulis Derrida untuk menganalisis Nietzsche dikatakan bahwa perempuan adalah konsep metafor sebagai nama untuk menandakan perbedaan seksual (*pra-ontologis*). “Nama” bagi perempuan memunculkan pertanyaan karena di dalam sebuah kalimat (teks) perempuan selalu disingkirkan. Di dalam struktur kebenaran perempuan selalu berlawanan. Perempuan adalah ketidakbenaran di dalam kebenaran (*non-truth of the truth*). Namun, ketidakbenaran ini adalah kebenaran, hanya saja perempuan tidak memiliki referensi literal yang tepat untuk menjadi benar. Tidak ada kebenaran bagi perempuan di dalam pemahaman historis. Dekonstruksi mengafirmasi kebenaran dua kali di dalam teks sehingga ia harus menjaga terus pertanyaan untuk selalu diajukan. Feminisme dan dekonstruksi sama-sama melihat pergeseran fase penerjemahan (*translation*) pertama menuju fase kedua di dalam strategi pembacaan teks. Bagi Spivak negosiasi (bukan kolaborasi) penting di dalam pembacaan perempuan sebagai *nontruth of truth*, tanpa harus menolak pemikiran antihumanisme modern tetapi juga tidak memberi jalan bagi maskulisme yang kental di dalam konsep modern.

Mengapa dekonstruksi tidak dapat direduksi ke dalam narasi? Dekonstruksi sebagai morfologi adalah struktur grafematik. Grafematik muncul dari pemikiran Derrida yang menganggap bahwa analisis tulisan secara historis adalah struktur yang beroperasi di dalam ketidakhadiran. Struktur ini mengalami repetisi yang dapat membuktikan dirinya sendiri. Penulisan (*writing*) adalah gejala yang muncul di dalam diskursus yang berbeda. Gejala ini disebut struktur grafematik yang mengorkestrasikan semua tindakan (termasuk tindakan berpikir) sebagai struktur penulisan (*writing*). Penulisan merupakan sesuatu yang menandai ketidakhadiran. Namun, kita tidak dapat menganggap bahwa ketidakhadiran dari kehadiran (*absence of presence*) ini dapat dijejaki secara struktural. Dengan kata lain, kita tidak dapat menemukan asalnya (*absence of origin*).

Pengulangan grafematik oleh penulisan ini adalah dua hal yang mengikat dekonstruksi (keberlangsungan yang tidak mengiyakan kebenaran). Misalnya, menempatkan laki-laki sebagai manusia di urutan pertama berarti menaruh perempuan pada urutan kedua, namun, penekanan ‘perempuan’ yang didefinisi

berdasar laki-laki dipertanyakan kembali, hal ini bukanlah sintetis tetapi menciptakan permasalahan baru, karena itu dekonstruksi selalu melihat ke depan, sembari melakukan dan menciptakan sesuatu, ke langkah selanjutnya yang tidak diketahui tetapi mungkin terjadi.

Subjek yang ajeg, menyatu, dan universal berasal dari menekan proses grafematik ini dengan meniadakan pertanyaan baru. Hal inilah yang membuat subjek terdesentralisasi ketika proses grafematik itu dijalankan. Subjek hanya dapat ditemukan jika menemukan posisi awal proses grafematik.

Subjek diasumsikan selalu menjadi pusat, di sinilah dekonstruksi berguna. Dekonstruksi mengingatkan bahwa pemusatan adalah efek dari struktur yang tak terbatas namun dapat ditentukan batasnya. Dengan dua pengikat dekonstruksi maka politik tidak dimungkinkan. Tetapi ketika politik mengabaikan resiko keretakan maka akan muncul fundamentalisme dimana kebingungan onto/epistemo/ ethicopolitical<sup>1</sup> menjadi gejala utama.

*Differance* adalah nama bagi keniscayaan struktur grafematik. *Differance* tidak dapat diulang berkali-kali karena ia hanyalah nama bagi dua pengikat yang mengijinkan adanya kemungkinan perbedaan. Identitas seksual adalah *differance* yang memproduksi perbedaan seksual. Asumsi awalnya, terdapat ruang yang tidak mengijinkan perbedaan dan menekan struktur grafematik, pada saat itu *differance* menjadi keniscayaan bagi perbedaan. Bukanlah perbedaan seksual yang menjadi masalah tetapi kita dapat berpikir secara berbeda. *Differance* bukanlah konsep atau metafor, namun *differance* dikonseptualisasikan dan dimetaforisasikan.

Di dalam diskursus falogosentrisme, perempuan adalah nama lain bagi *differance (irreducible double bind)*. Karena itu sulit untuk mengatakan bahwa feminisme bertentangan dengan dekonstruksi. Spivak melihat tidak ada jalan keluar. *Differance* ada di dalam perbedaan seksual dan itulah perempuan. Namun,

---

<sup>1</sup> Menurut Gayatri Spivak terdapat proyek ontologis/epistemologis dan etikopolitis di dalam feminisme. Proyek ontologis/epistemologis berlaku pada konsep 'perempuan' sedangkan etikopolitik lebih pada politik itu sendiri yang dijalankan oleh 'feminis'. Keduanya dibedakan sebagai teori feminis dan pergerakan perempuan, yaitu menyangkut knowing-being (apa yang diketahui) dengan right doing (apa yang dipraktikkan).

kita masih jauh dari subjek sebenarnya dari feminisme, kita masih mencari keberadaan subjek itu di dalam pertanyaan epistemik/ontologis.

Jika *differance* mempertanyakan tentang kemungkinan simbolis bukan berarti menekan bentuk kultural. Bentuk budaya yang membedakan budaya satu dengan lainnya dan semua bentuk perbedaan, di dalam ruang di antara, semua ini dibatasi oleh kemungkinan yang pada mulanya adalah tekanan yang tidak dapat kita atasi. Hal ini bukanlah alur-cerita yang mengabaikan perbedaan kultural. Kita masih tetap akan memutar kemungkinan alur-cerita, bahkan jika alur tersebut menempatkan budaya yang satu melawan atau mengatasi budaya yang lain.

Perempuan tidak dapat terus-menerus dinamakan untuk penulisan (*writing*) atau (*non-truth of differance*). Kita tidak dapat mengklaim dapat mengidentifikasi penindasan perempuan ke dalam feminisme dekonstruktif yang menempatkan perempuan sebagai nama bagi struktur grafematik (*nontruth of truth*). Kita harus mempertanyakan terus-menerus definisi ini. Hal ini membuka kritik epistemologi dan ontologi di dalam dekonstruksi. Hal ini menjadi peringatan bagi feminisme tradisional yang menentang dekonstruksi, dapat terjebak di dalam determinisme historis.

Jika struktur grafematik digunakan di dalam usaha pencapaian arah baru feminisme maka capaian maksimalnya adalah pertanyaan baru. Dekonstruksi selalu diikat oleh dua hal yang tidak mengiyakan kebenaran tetapi justru memunculkan pertanyaan baru. Pertemuan feminisme dengan posmodernisme melengkapinya dengan peralatan kritis untuk membongkar konsep hegemonik yang menghalangi jalan dan tujuan feminisme. Dengan menikung ke permasalahan keberagaman kultur, etnis, kesejarahan dan rasisme tentu saja menjadi peluang bagi feminisme untuk lebih kritis terhadap dirinya. Namun, posmodernisme tidak cukup untuk digabungkan dengan feminisme, ia hanya menjadi peluang bagi feminisme untuk berubah.

Teori feminisme kontemporer muncul dari pergolakan epistemologis yang mulai mengkritik dan mempertanyakan landasannya sendiri. Posmodernisme membuat feminisme mempertanyakan kembali landasan epistemologi yang dulu

dipegangnya. Feminisme dihadapkan dengan pertanyaan bagaimana meletakkan komitmen nilainya sendiri dengan resiko feminisme jatuh pada relativisme dan pluralisme. Menurut Yeatman, feminisme berada di puncak revolusi paradigma sementara keistimewaan dari paradigma alternatif yang baru muncul belumlah jelas. Atau dengan posmodernisme justru feminisme dapat terus membuka kemungkinan bagi pertanyaan yang baru sehingga dapat memperbaiki kerangka teoritisnya untuk kebaikan gerakan perempuan sendiri.

#### 4.3. Queer Theory

Queer teori berusaha mendestabilisasi identitas, ia menyeleksi dan menentukan apa yang dieksklusikan. Queer teori berupaya menciptakan teori yang inklusif, menyangkut seksualitas yang tidak normatif. Queer teori menyangkut analisis seksualitas transgender, transvetisme, dan transeksualisme yaitu perorangan yang menggunakan arti trans, yaitu melihat seksualitas tidak secara normatif. Hal ini untuk melawan bineritas gender yaitu perempuan dan laki-laki. Queer teori menunjukkan posisi individu yang memiliki seksualitas yang ambigu dan tidak murni.

Queer teori merupakan titik balik posmodern terhadap studi seksualitas. Ia berusaha mengangkat tema ambigu dan fragmentasi identitas dimana pemahaman tentang identitas tidak lagi singular. Queer teori mengkritik posisi identitas itu sendiri. Karena itu posisinya berada di dalam fase *post-identity*. Queer teori merupakan kritik posmodern tentang identitas metanaratif, identitas yang homogen dan ajeg yang pada akhirnya jatuh ke esensialisme. Queer teori memandang bahwa identitas tidak muncul secara alamiah tetapi dikonstruksi dan konstruksi tersebut sama sekali tidak koheren dan stabil. Karena itu seksualitas dapat mengalami disposisi maupun ambiguitas di dalam penekanan keajegan seksualitas. Queer teori juga mencoba mendekonstruksi kategori seksualitas yang normatif yaitu gender yang membedakan perempuan dan laki-laki serta homoseksual dan heteroseksual. Ia juga berpartisipasi dalam mendestabilisasi kategori bineritas pusat/pinggir, barat/timur, dunia pertama/dunia ketiga, yang menjadi permasalahan di dalam feminisme poskolonial. Karena itu queer teori

mencari dan menginvestigasi pola eksklusi dan seleksi di dalam bentuk bineritas ini.

Queer teori juga merupakan diskursus tandingan yang diajukan homoseksualitas terhadap heteronormativitas di dalam heteroseksualisme. Queer teori membahas tentang lesbianisme, gay, biseksual, dan transeksual/transgender. Queer secara peyoratif berarti menyimpang dan abnormal, hal ini menyangkut identitas seksual yang dianggap patologis menurut psikoanalisis. Queer teori memiliki trajektori sejarah sendiri mengapa kondisi penyimpangan ini terbentuk dan di dalamnya queer teori sendiri ingin merevaluasi asumsi identitasnya... *'denaturalizing dominant understandings of sexual identity'...*

Queer teori menantang segala sesuatu yang alamiah, koheren dan stabil. Dengan kata lain ia mendenaturalisasi konsep identitas yang dikonstruksi secara alamiah sehingga menciptakan jarak dengan politik identitas. Karena selama ini agenda politik gender justru mengeksklusi secara halus konstituennya. Kritik identitas ini bersamaan dengan penekanan pada multiplisitas, fluiditas dan instabilitas. Politik identitas selama ini telah berubah menjadi politik perbedaan dimana perbedaan itu sendiri menjadi kritik atas komunalitas universal gerakan perempuan. Queer teori ingin menantang asumsi psikoanalisis yang menganggap bahwa seksualitas itu stabil dan koheren bahwa tatanan bahasa selalu memiliki makna yang ajeg, termaksud di dalamnya makna tentang Diri.

Selama ini, heteroseksual dianggap sebagai puncak piramid erotis sedangkan transeksual, transvetisme, fetis, sadomasokis, pekerja seksual, mereka yang erotismenya melanggar batasan diposisikan di piramid paling bawah. Lesbian harus membebaskan kesadarannya dari ide semu bahwa ia adalah seorang yang menyimpang, abnormal, sakit, gila atau buruk hanya karena ia menikmati hubungan seksual dengan perempuan dan bukan dengan laki-laki. Segalanya dibentuk oleh konstruksi sosial karena perbedaan gender antara peran laki-laki dan perempuan ini kemudian dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sosial daripada biologis, mereka dapat berubah dengan agensi manusia. Kelompok individu yang dimarginalisasikan harus merebut hak mereka akan identitas.

Feminisme melandaskan diri pada determinisme biologis dimana terdapat pembagian yang ajeg antara feminin dan maskulin. Hal ini juga dipengaruhi oleh wacana psikoanalisis yang menganggap bahwa perkembangan normal seksualitas adalah ketika perempuan menjadi feminin dan laki-laki menjadi maskulin. Di luar apa yang disebut sebagai normal maka hal itu masuk ke dalam penyimpangan bahkan patologi. Psikoanalisis sendiri melihat dari anatomi tubuh secara biologis. Tetapi sebenarnya di dalam perkembangan biologi mutakhir kita dapat melihat bahwa perbedaan seksual tidaklah ajeg. Kondisi biologis tidaklah deterministik. Pada dasarnya biologi sendiri dilandaskan pada kontingenitas dimana suatu saat kondisinya akan berubah baik oleh faktor dari dalam maupun dari luar. Setiap gen memiliki variasi yang bergantung pada struktur dan susunan kromosom sehingga identitas menjadi problem diversitas kemampuan biologis untuk memunculkan variasi. Hanya variasi yang diakui sosial yang dapat memiliki identitas penuh. Apakah kita masih harus bergantung pada ontologisasi identitas sementara kondisi biologis dan genetis kita yang menjadi determinan paling kuat menuntut kontingenitas.

Kuasa dan resistensi memunculkan konsep identitas. Identitas adalah suatu yang dikonstruksi secara historis. Bagi lesbian rekonstruksi identitas dibentuk dalam 'politik identitas' berdasar pembedaan hierarkis dari identitas-identitas yang lain. Model ini memberikan kesempatan gay dan lesbian untuk membentuk persekutuan. Dahulu homoseksualitas adalah bentuk pembangkangan terhadap masyarakat, hari ini, homoseksualitas adalah pencarian identitas. Homoseksualitas yang dibentuk dalam wacana hegemonik dalam seksualitas digantikan oleh sebuah komunitas yang melintasi identitas dan perbedaan politisnya.

#### **4.4. Demokrasi dan Feminisme**

Persoalan sebenarnya di dalam feminisme adalah bagaimana memandang hubungan subjek dengan yang lain, antara kita dan mereka. Problem ini muncul di dalam politik representasi feminisme yang kemudian menjadi bentuk hegemonik. Feminisme mengandaikan subjeknya homogen dan memiliki kesetaraan. Dalam pencarian homogenitas ini bagaimana hubungan feminisme dengan demokrasi, apakah demokrasi mampu menggantikan feminisme untuk mengkomodir seluruh

kepentingan perempuan. Demokrasi memang muncul dari pertanyaan antara kita dan mereka, demos dan di luar demos, yang diatur dan yang mengatur. Karena itu demokrasi juga mengandaikan partisipannya memiliki kesetaraan dan homogen. Berbeda dengan liberalisme yang mengandaikan kesetaraan bagi kemanusiaan, demokrasi menggunakan kesetaraan untuk konsep 'people' yang menyangkut juga kedaulatan maupun legitimasi politik.

Ketika kesetaraan kemanusiaan universal dibuat maka akan terdapat eksklusif bagi yang lain ataupun asing karena itu tidak ada kesetaraan yang absolut. Demokrasi itu sendiri bukanlah lingkaran yang tertutup tetapi paradox. Di satu sisi dia bersifat eksklusif namun di sisi lain demokrasi dapat menjadi inklusif. Permasalahan demokrasi memang memiliki persamaan dengan permasalahan feminisme yaitu menyangkut politik representasi. Dimana politik representasi feminisme juga mengeksklusif kategori perempuan yang lain. Cara feminisme memandang hubungan subjek dan yang lain juga masih timpang. Terdapat batas antara subjek dan yang lain sehingga 'yang lain' dianggap sebagai abstraksi atau asumsi di dalam konsensus. Sedangkan demokrasi menghadirkan subjek dan 'yang lain' secara bersama sebagai sebuah ketegangan politik. Di dalam demokrasi hubungan menjadi friend-enemy yang merupakan bentuk dari kita dan mereka yang duduk bersama.

Apakah demokrasi kompatibel dengan feminisme? Karena logika demokrasi dikarakterisasi oleh lingkaran tertutup yang terdiri dari proses konstitusi 'the people'/masyarakat. Bahkan demokrasi masih harus bernegosiasi dengan paradoksnya maupun lingkaran tertutup itu. Karena itu identitas di dalam demokrasi menyangkut kita dan mereka sehingga hubungannya eksklusif-inklusif. Jika liberal memiliki konsep kunci 'kemanusiaan' maka demokrasi memiliki kata kunci demos. Seyla Benhabib menganggap demokrasi sebagai rekonsiliasi rasionalitas dengan legitimasi, demokrasi menyangkut ekspresi *common good* (kebaikan bersama) yang harus kompatibel dengan kedaulatan *the people* (rakyat).

Demokrasi masih mengandaikan adanya konsensus. Pertanyaannya dapatkah di dalam konsensus tidak terjadi eksklusif. Misalnya di dalam demokrasi deliberatif yang mengandaikan partisipannya rasional, bukankah akhirnya

menyingkirkan yang irasional. Demokrasi deliberatif menciptakan batasan bagi kita dan mereka, siapa yang berada di dalam lingkaran konsensus dan siapa yang di luar itu. Konsensus merupakan bentuk hegemoni dan kristalisasi hubungan kuasa. Pada akhirnya yang memutuskan mana yang legitimate dan mana yang tidak legitimate adalah politik dimana secara noramatif dikontestasi. Di dalam konsensus akan terdapat eliminasi perbedaan maupun keberagaman di dalam ruang publik.

Konsep 'kita' berusaha menyatukan berbagai kalangan dengan identitas yang berbeda. Liberalisme sendiri menyadari bahwa terdapat berbagai kepentingan di dalam masyarakat. Bahwa individu tidak memiliki posisi awal ketika memasuki komunitas tetapi mereka membawa identitas masing-masing. Tidak ada model *common identity* di dalam demokrasi. Di dalam *veil of ignorance* sebisa mungkin individu tidak membawa kepentingannya (*modus vivendi*). Demokrasi tidak memberi tempat bagi keberagaman atau pluralisme karena statusnya homogen. Penciptaan suatu identitas tidak lebih merupakan sebuah hasil dari artikulasi politik yang hegemonik. Tetapi konstitusi identitas itu sendiri tidak penuh dan hanya dapat hadir ketika identifikasi dikompetisikan. Demokrasi itu sendiri memunculkan gap antara *the people* dan berbagai macam bentuk identifikasi. Karena itu demokrasi berusaha untuk menutup ruang yang penuh dengan kontestasi tak terhingga ini dengan konsesus rasional.

Demokrasi tidak dapat menggantikan politik representasi feminisme. Menciptakan sebuah sistem yang berlandaskan hak maupun kesetaraan demi kedaulatan masyarakat adalah penting tetapi subjek feminisme sendiri tidak dapat diposisikan *before the law*. Ketika subjek berada sebelum hukum maka hubungan antara kita dan mereka memiliki batasan absolut. Sehingga terdapat pemisahan antara subjek dengan yang lain. Subjek feminisme sendiri merupakan efek dari politik, hasil dari konstruksi politik dan juga konsekuensi dari berbagai kontestasi norma. *The other* ini tidak cukup dikatakan sebagai *constitutive outside* di dalam sebuah lingkaran tertutup. Tetapi harus dianggap sebagai sesuatu yang konkret dengan melihat perbedaan kesejarahan, ras dan kelas.